ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA TAHUN 2013-2022

SKRIPSI

Oleh:

Nama	:	Berlianti Niken Kusmardiyani
Nomor Mahasiswa	:	20313112
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

HALAMAN JUDUL

ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA TAHUN 2013-2022

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir

Guna memperoleh gelar Sarjana jenjang Strata 1 Program

Studi Ekonomi Pembangunan

pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

Nama	:	Berlianti Niken Kusmardiyani
Nomor Mahasiswa	:	20313112
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperi dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 5 Mei 2024

Penulis,



Berlianti Niken Kusmardiyani

Scanned with CamScanner

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA TAHUN 2013-2022

Nama	:	Berlianti Niken Kusmardiyani
Nomor Mahasiswa	:	20313112
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 8 Mei 2024

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing



Prof. Jaka Sriyana, S.E,. M.Si., Ph.D.

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Universitas Islam Indonesia
Condong Catur Depok Yogyakarta
55283
T. (0274) 881546, 885376
F. (0274) 882589
E. fbe@uii.ac.id
W. fbe.uii.ac.id

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada Semester Genap 2023/2024, hari Jum'at, tanggal 28 Juni 2024, Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII telah menyelenggarakan Ujian Tugas Akhir/Skripsi yang disusun oleh:

Nama	: BERLIANTI NIKEN KUSMARDIYANI
NIM	20313112
Judul Tugas Akhir	: Analisis Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Tahun 2013-2022
Dosen Pembimbing	: Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D.

Berdasarkan hasil evaluasi Tim Dosen Penguji Tugas Akhir, maka Tugas Akhir (Skripsi) tersebut dinyatakan:

Lulus

Nilai : A

Referensi : Layak ditampilkan di Perpustakaan

Tim Penguji:

Ketua Tim : Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D. .....

Anggota Tim : Dr. Sahabudin Sidiq, M. A. .....

Yogyakarta, 28 Juni 2024

Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan,

Abdul Hakim, SE, M.Ec., Ph.D.
NIK. 963130101

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Analisis Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Tahun 2013-2022

Disusun oleh : BERLIANTI NIKEN KUSMARDIYANI

Nomor Mahasiswa 20313112

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Jum'at, 28 Juni 2024

Penguji/Pembimbing Skripsi : Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D. .....

Penguji : Dr. Sahabudin Sidiq, M. A. .....

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahi rabbil'alamiin

Puji Syukur senantiasa selalu diucapkan terhadap Allah SWT atas limpahan nikmat yang luar biasa, yang telah memberikan kekuatan, serta memberikan ilmu pengetahuan selama ini. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan, sehingga peneliian sederhana ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kedapa baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Sega perjuangan hingga titik ini, penulis mempersembahkan teruntuk orang-orang hebat yang selalu menjadi penyemangat sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini yaitu :

1. Untuk kedua orang tua yang telah mendoakan, memberi dukungan, kasih saying, dan motivasi yang tak terhingga, terimakasih atas Upaya, tanpa batas yang orang tua penulis lakukan untuk membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Semua keluarga yang telah memberi dukungan dan kontribusi.
3. Dosen Pembimbing penulis Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D. serta seluruh dosen fakultas Bisnis dan Ekonomika atas ilmu yang telah diberikan dan sangat bermanfaat bagi saya hingga sekarang.
4. Teman-teman yang luar biasa, yang telah memberi dukungan, semangat, dan keceriaan sepanjang perjalanan penulisan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahi rabbil'alamiin.

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat, hidayah, dan Rahmat-nya sehingga dengan pertolongan-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Analisis Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Fiskal Tergadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Tahun 2013-2022**" telah terselesaikan dengan baik dan lancer. Penelitian ini dilaksanakan sebagai prasyarat dalam memperoleh gelar Sarjana jenjan Strata 1 di Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini sulit tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas segala karunia, Rahmat, dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
2. Kedua orang tua, Ibu Ninik Eki Mardiyani dan Bapak Joko Subroto yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan doa yang tak pernah putus, materi, motivasi, nasihat, serta memberikan kekuatan untuk bisa mencapai keberhasilan dan kesuksesan di masa depan yang membuat penulis selalu bersyukur telah memiliki keluarga yang sangat luar biasa. Serta kakak saya Berliandi Adi Brata dan adik saya Berlianti Kusumawardani yang selalu memberikan semangat, dukungan dan mendoakan penulis.
3. Untuk diri sendiri Berlianti Niken Kusmardiyani, karena telah mampu melewati banyaknya rintangan dalam mencapai titik ini. Terima kasih telah bertahan dan berjuang dari awal hingga saat ini, telah mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan, merupakan pencapaian yang sangat luar biasa yang perlu dibanggakan untuk diri sendiri.

4. Kepada orang special.
5. Pembimbing skripsi, Bapak Prof.Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D. yang telah membantu dalam meluangkan waktu, saran dan ilmu yang bermanfaat sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi.
6. Bapak dan ibu Dosen Ekonomi yang mengajar dan memberikan ilmu selama penulis kuliah di Jurusan Ekonomi
7. Semua teman-teman Ilmu Ekonomi 2020 yang telah banyak membantu, berbagi ilmu selama penulis kuliah di Jurusan Ekonomi.
8. Semua teman penulis

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 8 Mei 2024

Penulis,

Berlianti Niken Kusmardiyani

DAFTAR ISI

ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA TAHUN 2013-2022 ***I***

HALAMAN JUDUL ***II***

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA ***II***

HALAMAN PENGESAHAN ***IV***

PENGESAHAN UJIAN *Error! Bookmark not defined.*

HALAMAN PERSEMBAHAN ***VII***

KATA PENGANTAR ***VIII***

DAFTAR ISI ***X***

DAFTAR GAMBAR ***XIII***

DAFTAR TABEL ***XIV***

DAFTAR LAMPIRAN ***XV***

ABSTRAK ***XVI***

BAB I PENDAHULUAN ***1***

Gambar 1. 1 Ketimpangan Pendapatan Nasional (Gini Ratio) Tahun 2013-2022 3

Tabel 1. 1 Realisasi Dana Perimbangan Seluruh Provinsi Di Indonesia Tahun 2013-2022 (Milliar) 4

Gambar 1. 2 Laju Pertumbuhan PDB Indonesia Tahun 2013-2022 6

1.2. Rumusan Masalah 8

1.3. Tujuan Penelitian 8

1.4. Manfaat Penelitian 9

BAB II KAJIAN PUSTAKA ***10***

2.2. Landasan Teori 13

2.2.1. Ketimpangan Pendapatan 13

A. Kurva Lorenz 14

Gambar 2. 1 Kurva Lorenz 14

B. Indeks Gini 15

2.2.2. Desentralisasi Fiskal 15

2.2.3. Jumlah Penduduk 16

2.2.4. PDRB Per Kapita 17
Gambar 2. 2 Kurva U Terbalik 17
2.3. Hubungan Antar Variabel 18
2.3.1. Hubungan Dana Alokasi Umum Terhadap Ketimpangan Pendapatan 18
2.3.2. Hubungan Dana Alokasi Khusus Terhadap Ketimpangan Pendapatan 18
2.3.3. Hubungan Dana Bagi Hasil Terhadap Ketimpangan Pendapatan 19
2.3.4. Hubungan Jumlah Penduduk Terhadap Ketimpangan Pendapatan 19
2.3.5. Hubungan PDRB Terhadap Ketimpangan Pendapatan 20
2.4. Kerangka Berfikir 20
2.5. Hipotesis 22
BAB III METODE PENELITIAN 23
3.1. Jenis dan Cara Pengumpulan Data 23
3.2. Definisi Variabel 24
3.3. Metode Analisis 24
3.4. Estimasi Model Regresi Data Panel 26
3.4.1. Common Effect Model 26
3.4.2. Fixed Effect Model 27
3.4.3. Random Effect Model 28
3.5. Pemilihan Model Estimasi 28
3.5.1. Uji Chow Test 28
3.5.2. Uji Hausman 29
3.6. Uji Hipotesis 30
3.6.1. Uji Simultan (Uji F) 30
3.6.2. Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji T) 30
3.6.3. Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2) 30
BAB IV 32
4.1. Analisis Deskriptif 32
4.2. Pemilihan Model Terbaik 33
4.2.1. Uji Chow (Uji F-test) 33
4.2.2. Uji Hausman 34
4.3. Analisis Model Terbaik 34
4.3.1. Uji F (Simultan) 35
4.3.2. Uji T (Parsial) 36
A. Uji Dana Alokasi Umum terhadap Ketimpangan Pendapatan 36

B. Uji Dana Alokasi Khusus terhadap Ketimpangan Pendapatan 37
C. Uji Dana Bagi Hasil terhadap Ketimpangan Pendapatan 37
D. Uji Jumlah Penduduk Terhadap Ketimpangan Pendapatan 37
E. Uji Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Ketimpangan Pendapatan 37
4.3.3. Koefisien Determinasi (R^2) 37
4.4. Pembahasan Hasil 38
4.4.1 Analisis Pengaruh DAU Terhadap Ketimpangan Pendapatan 38
4.4.2 Analisis Pengaruh DAK Terhadap Ketimpangan Pendapatan 39
4.4.3 Analisis Pengaruh DBH Terhadap Ketimpangan Pendapatan 39
4.4.4 Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Ketimpangan Pendapatan 40
4.4.5 Analisis Pengaruh PDRB Terhadap Ketimpangan Pendapatan 41
BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 42
5.2. Implikasi 42
DAFTAR PUSTAKA 44
LAMPIRAN-LAMPIRAN 47
Lampiran I. Data Penelitian 47
Lampiran II. Analisis Deskriptif 58
Lampiran III. Hasil Uji Chow 59
Lampiran IV. Hasil Uji Hausman 60
Lampiran V. Model Terbaik Fixed Effect Model 61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Ketimpangan Pendapatan Nasional (Gini Ratio) Tahun 2013-2022 3
Gambar 1. 2 Laju Pertumbuhan PDB Indonesia Tahun 2013-2022..... 6

Gambar 2. 1 Kurva U Terbalik.....17
Gambar 2. 2 Kurva Lorenz 14
Gambar 2. 3 Kerangka Berfikir 21

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Realisasi Dana Perimbangan Provinsi Di Indonesia Tahun 2013-2022.....4

Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel 23

Tabel 4. 1 Analisis Deskriptif..... 32
Tabel 4. 2 Hasi Uji Chow 33
Tabel 4. 3 Hasil Uji Hausman..... 34
Tabel 4. 4 Model Terbaik Fixed Effect Model 34

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Data Penelitian..... 45
Lampiran II. Analisis Deskriptif..... 56
Lampiran III. Hasil Uji Chow..... 57
Lampiran IV. Hasil Uji Hausman..... 58
Lampiran V. Model Terbaik Fixed Effect Model..... 59

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia tahun 2013-2022. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), dan SIMREG-Bappenas. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan metode regresi data panel. Penelitian ini menghasikan bahwa Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Hasil Dana Alokasi Khusus dan Jumlah Penduduk tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Implikasi dari Dana Alokasi Umum adanya penambahan 1 juta rupiah DAU akan menjadikan bertambahkan nilai kesenjangan pendapatan masyarakat. Selain itu, Porsi DBH pajak yang diterima oleh seluruh kabupaten/kota di luar daerah sangatlah kecil, hal ini membuat daerah yang tertinggal kesulitan dalam memenuhi kebutuhan daerahnya meskipun sudah menerima dana bagi hasil pajak, dan PDRB dapat dilihat dari segi social-politik dan dari sisi tabungan.

Kata Kunci : Ketimpangan Pendapatan, DAU, DAK, DBH, Jumlah Penduduk, PDRB

BAB I
PENDAHULUAN

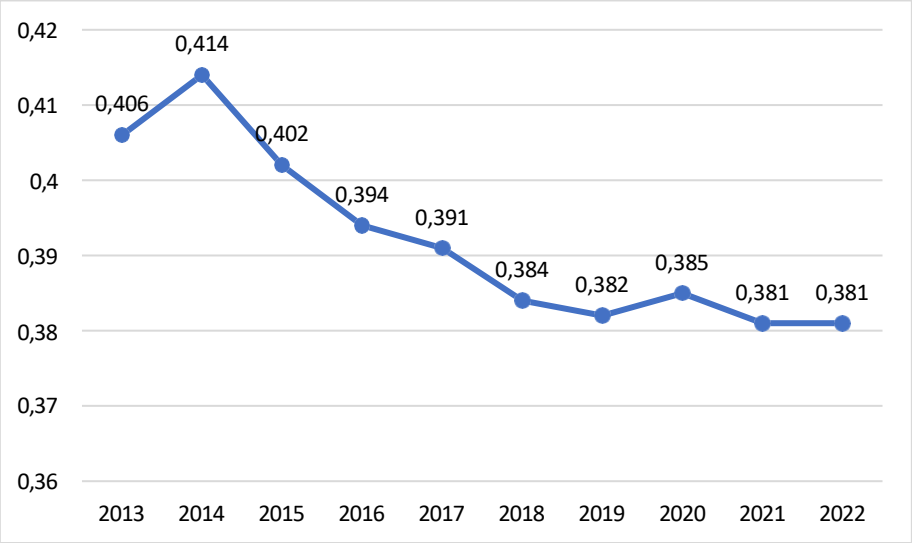
1.1. Latar Belakang

Desentralisasi fiskal merupakan sebuah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut pola hubungan antara pemerintah nasional dan pemerintah lokal, kebijakan desentralisasi fiskal sebagaimana tertulis dalam undang-undang no. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah pusat. Bertujuan untuk yang pertama, menyelaraskan dengan kebijakan ketahanan fiskal yang berkesinambungan (*sustainable*). Kedua, memperkecil adanya ketimpangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*vertical imbalance*). Ketiga, berupaya mengoreksi ketimpangan antar daerah didalam kemampuan keuangan (*horizon imbalance*). Keempat, berupaya meningkatkan akuntabilitas. Efektivitas dan efisiensi dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah dalam suatu daerah. Kelima, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dan keenam mamaksimalkan partisipaso masyarakat dalam pengambilan keputusan pada sektor publik (demokrasi) (Zulyanto, 2012).

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi di Indonesia dirancang dengan empat komponen utama, diantaranya yaitu : politik, administrasi, fiskal, dan ekonomi. Yang dimana pelaksanaan desentralisasi politik dilaksanakan dengan penyerahan wewenang politik terhadap kepala daerah yang dipilih melalui Pilkada. Desentralisasi dilaksanakan untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Desentralisasi ekonomi dilaksanakan dengan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi yang terjadi di lingkungan masyarakat. Sedangkan desentralisasi fiskal merupakan peralihan tanggung jawab pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dengan baik dan efisien baik dalam pendapatan ataupun pengeluaran (Puspita & Hamidi, 2021).

Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia merupakan penekanan terhadap rasa kekecewaan di daerah terhadap sentralisme pemerintah pusat. Khususnya pada kegiatan eksploitasi sumber daya di daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat tanpa dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang merata terhadap masyarakat di daerah (Wicaksono, 2012). terdapat 120 pemerintah daerah di Indonesia yang berisiko menghadapi situasi keuangan yang sulit karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mereka miliki tidak dapat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan anggaran. Jika dilihat dari rata-rata data Departemen Dalam Negeri hanya terdapat 5% saja kebutuhan anggaran yang bisa dipenuhi oleh PAD, sedangkan sisanya hanya bisa bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Lestari, 2023).

Ketimpangan pendapatan merupakan suatu permasalahan yang seringkali dihadapi oleh negara berkembang seperti Indonesia. Perbedaan pendapatan yang diterima oleh setiap Masyarakat yang memiliki pendapatan lebih besar dan Masyarakat yang memiliki pendapatah dibawahnya merupakan gejala dari adanya ketimpangan pendapatan (Fitri, 2018). Pemerintah menggunakan *Gini Ratio* (Koefisien Gini) sebagai alat untuk mengukur dan melihat ketimpangan pendapatan yang ada di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun tidak dibersamai dengan pemerataan distibusi pendapatan, menimbulkan konsekuensi semakin parahnya kondisi ketimpangan pendapatan di Indonesia. Suatu negara yang memiliki pendapatan perkapita yang tinggi belum menentukan bahwa semua penduduknya hidup makmur. Besar atau kecilnya ketimpangan pendapatan antar provinsi di Indonesia biasanya digunakan untuk menilai kinerja dari suatu provinsi. Apabila pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berjalan lancar, maka dapat mengurangi ketimpangan disetiap provinsi melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Desa (Chayyani, 2021).



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1. 1 Ketimpangan Pendapatan Nasional (Gini Ratio) Tahun 2013-2022

Pada Gambar terlihat bahwa kondisi ketimpangan pendapatan nasional pada tahun 2013-2019 diperiode tersebut angka ketimpangan pendapatan nasional setiap tahunnya terus mengalami penurunan yang cukup drastis. Namun, pada tahun 2020 angka ketimpangan pendapatan nasional kembali mengalami kenaikan sebesar 0,382. Selanjutnya tingkat ketimpangan nasional kembali mengalami penurunan dari tahun 2021 hingga 2022. Sejak tahun 2015, terjadi penurunan Tingkat ketimpangan secara nasional sampai dengan tahun 2019. Hal ini menunjukan bahwa segala bentuk kebijakan yang telah dilakukan baik dari sisi sosial dan ekonomi sudah berlangsung cukup baik. Akan tetapi perbaikan tersebut ternyata tidak berlangsung lama setelah pandemi COVID-19 memasuki Indonesia. Dapat kita lihat bahwa ketimpangan yang diukur menggunakan Gini Ratio tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2020 dan kembali turun pada tahun 2021.

Dengan tujuan desentralisasi fiskal untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan dan hasilnya lebih mendekatkan layanan pemerintah kepada masyarakat sekaligus mengurangi kesenjangan antara daerah. Transfer

keuangan pemerintah daerah dilaksanakan melalui sisi belanja daerah di keuangan pemerintah pusat dan penerimaan pada keuangan pemerintahan daerah yaitu melalui instumen yang sering disebut sebagai instrument keseimbangan fiskal (*fiscal balancing instrument*). Di Indonesia dalam prakteknya instrument tersebut diimplementasikan melalui Dana Bagi Hasil (DBH) baik penerimaan pajak maupun non-pajak. Kemudian, dapat melalui instrument tranfer tanpa syarat (*less conditioned-type transfer instrument*) yang dilaksanakan melalui Dana Alokasi Umum (DAU), dana ini diberikan berdasarkan dengan kapasitas fiskal yang dimiliki oleh masing-masing daerah yang diharapkan dapat mengatasi disparitas kemampuan keuangan daerah untuk mendorong pembangunan. Selanjutnya melalui instrumen transfer bersyarat (*conditioned-type transfer instrument*) atau Dana Alokasi Khusus yang diberikan sesuai dengan prioritas dan arah tujuan pemabngunan nasional (Doriza *et al.*, 2012).

Tabel 1. 1 Realisasi Dana Perimbangan Seluruh Provinsi Di Indonesia Tahun 2013-2022 (Milliar)

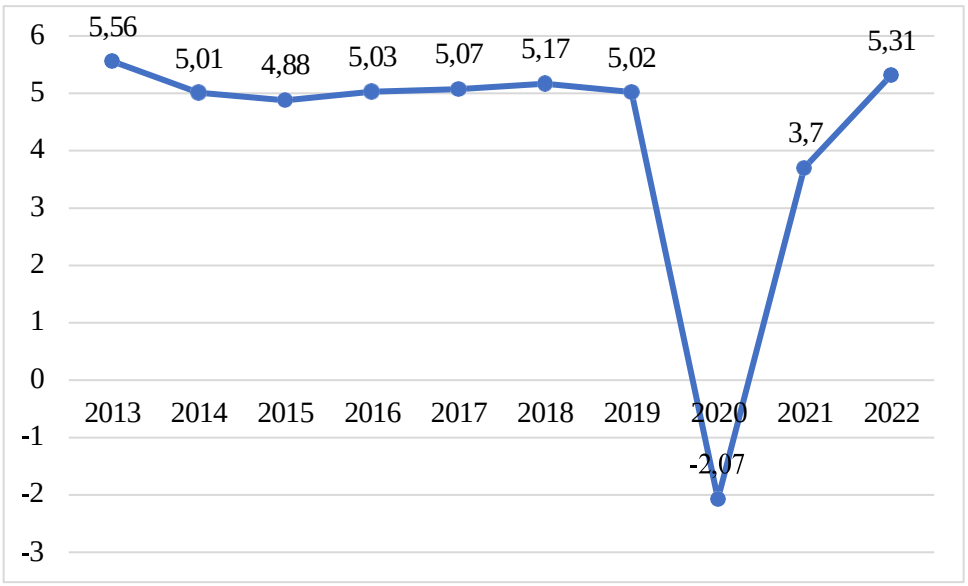
Tahun	DAU	DAK	DBH
2013	30.977.874.897	1.775.385.277	32.080.933.173
2014	34.121.932.565	1.873.244.771	32.887.611.175
2015	35.288.784.853	3.610.202.097	22.689.716.825
2016	38.538.077.004	44.528.571.272	22.178.206.084
2017	55.763.530.032	59.998.473.695	33.535.350.766
2018	56.606.500.497	60.548.838.048	35.130.152.573
2019	58.691.805.994	66.244.328.451	34.326.791.971
2020	53.313.673.855	67.973.780.481	36.217.448.355
2021	60.669.496.563	74.738.449.422	32.443.354.278
2022	37.800.000.000	54.783.950.000	16.841.411.000

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari Tabel 1.1 diatas terlihat bahwa dari tahun 2013-2018 dana perimbangan yang dialokasikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terus meningkat dengan signifikan setiap tahunnya. Tingginya dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat ini menjadi bukti nyata pelaksanaan desentralisasi fiskal pemerintah daerah diberikan kepercayaan sepenuhnya oleh pemerintah pusat untuk bisa mengatasi persoalan ketimpangan pendapatan dan mendorong pembangunan di daerah masing-masing. Pada tahun 2020, dana perimbangan mengalami penurunan yang dimana pandemi Covid-19 melanda dunia, termasuk Indonesia. Sehingga, adanya penyesuaian anggaran yang yang dialokasikan untuk kepentingan kesehatan. Tetapi ditahun berikutnya dana perimbangan kembali mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, menurut BPS Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga digunakan untuk mengetahui besarnya struktur perekonomian dan peranannya pada sektor ekonomi (Ma'mun & Fuadi, 2023). Salah satu dari indicator keberhasilan pelaksanaan Pembangunan yang dapat dijadikan tolak ukur secara makro adalah pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari perubahan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dalam suatu wilayah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi dari suatu wilayah menandakan kegiatan ekonomi daerah. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah terus menerus berkesinambungan selaras dengan pola tertentu berdasarkan hasil kajian yang cermat terhadap situasi dan kondisi yang baik. Pembangunan yang bersifat menyeluruh dan tuntas perlu dilaksanakan, sehingga sasaran Pembangunan dapat tercapai secara maksimal, akan tetapi kemampuan dari setiap daerah dalam Pembangunan berbeda-beda (Romhadhoni *et al*., 2019).

Oleh karena itu penelitian ini membahas tentang analisis pengaruh PDRB terhadap ketimpangan pendapatan.



Sumber :Badan Pusat Statistik

Gambar 1. 2 Laju Pertumbuhan PDB Indonesia Tahun 2013-2022

Dari gambar diatas terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 5,31%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 yang hanya mencapai 3,70 saja. Tidak hanya menungguli besaran pada tahun 2021, akan tetapi pertumbuhan ekonomi pada 2022 ini merupakan capaian tertinggi sejak tahun 2013 lalu yang mencapai 5,56%. Pertumbuhan PDB Indonesia terhitung sejak tahun 2016 memperoleh hasil fluktiatif mencapai 5.03% peningkatan terjadi dalam tahun 2027 yang mencapai 5,02% saja. Angka pertumbuhan ekonomi menurun drastis hingga mencapai hasil -2,07% pada 2020. Hal ini terjadi karena pandemi COVID-19 serta pembatasan sosial yang mengakibatkan terbatasnya aktivitas perekonomian di Indonesia. Meskipun masih dalam kondisi pandemi pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami peningkatan, yaitu mencapai 3,70% pada 2021.

Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan dinamis antara jumlah penduduk yang bertambah atau yang berkurang, perkembangan penduduk

dipengaruhi oleh jumlah atau banyaknya bayi yang lahir akan tetapi secara bersamaan dipengaruhi juga oleh jumlah kematian yang terjadi pada semua golongan umur. Pada konteks spasiap mobilitas penduduk juga berpengaruh terhadap perubahan pada jumlah penduduk, Dimana imigrasi bertambah dan jumlah penduduk dan emigrasi akan mengurangi jumlah penduduk di dalam suatu wilayah. Jumlah penduduk yang besat bagi sebagian kalangan merupakan suatu hal yang bisa dikatakan positif karena dengan jumlah penduduk yang besar dapat dijadikan sebagai subjek Pembangunan, perekonomian akan apabila jumlah tenaga kerjanya banyak. Akan tetapi disisi lain dalam beberapa kalangan justru meragukan apabila penduduk yang bertambah merupakan beban bagi Pembangunan. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan yang semakin lama semakin banyak perkembangan jumlah penduduk tersebut. Pertumbuhan penduduk menurut deret ukur sementara pertumbuhan kebutuhan bahan makanan menurut deret hitung. Artinya adalah bukan kesejahteraan yang didapat tapi justru kemelaratan akan dijumpai apabila jumlah penduduk tidak dikendalikan dengan baik (Rochaida, 2016).

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas terkait kebijakan desentralisasi fiskal merupakan cerminan dari keberhasilan daerah dalam menjalankan otonominya dan merupakan upaya untuk mengatasi ketimpangan pendapatan di Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Tahun 2013-2022".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut :

A. Apakah terdapat pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia tahun 2013-2022?
B. Apakah terdapat pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia tahun 2013-2022?
C. Apakah terdapat pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia tahun 2013-2022?
D. Apakah terdapat pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia 2013-2022?
E. Apakah terdapat pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia tahun 2013-2022?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah penulis uraikan diatas, maka tujuan yang diharapkan penulis dari penelitian ini yaitu:

A. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia tahun 2013-2022.
B. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia tahun 2013-2022.
C. Untuk menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia tahun 2013-2022.
D. Untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia tahun 2013-2022.
E. Untuk menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia tahun 2013-2022.

1.4. Manfaat Penelitian

Maanfaat yang di harapkan dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Memberikan wawasan bagi penulis maupun pembaca tentang pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, produk domestrik regional bruto dan jumlah penduduk terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk pihak yang membutuhkan, terutama yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitain Terdahulu

Pada penelitian ini, peneliti mengacu terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dengan pembahasan topik yang sama sebagai rujukan dalam melakukan penelitian. Dengan beberapa rujukan dari penelitian-penelitian sebelumnya, sebagai berikut:

(Romhadhoni *et al.*, 2019) melakukan sebuah penelitian yang berjudul "Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Antar Derah". Lingkup penelitian ini terdiri dari desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar daerah yang ripublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatam. Jenis penelitian ini deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda sebagai analisis data. Dalam pengelolaan data dalam penelitian ini menggunakan software Eviews10. Hasil pengelolaan data dalam penelitian ini menunjukan bahwa desentralisasi fiskal yang diproksi dari total dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan antar daerah di Provinsi Kalimantan Selatan. Namun pertumbuhan ekonomi yang paling dominan mempengaruhi terhadap ketimpangan antar daerah

(Fitri, 2018) melakukan sebuah penelitian yang berjudul "Ketimpangan Pendapatan Provinsi di Indonesia Tahun 2012-2016" tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis Ketimpangan pendapatan antar provinsi di Indonesia dengan data panel. Menurut hasil penguji model terbaik adalah Common Effect yang digunakan dalam menganalisis factor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa variable PDRB Perkapita (X1) berpengaruh negatif dan signifikan, Variabel Jumlah Penduduk (X2) berpengaruh positif namun tidak berpengaruh signifikan dan Variabel (X3) Total (Belanja Modal, Belanja Barang & Jasa dan Belanja Pegawai) berpengaruh positf dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia tahun 2012-2016.

(Dewinda Santi dan Doddy Aditya Iskandar & Artikel, 2021) melakukan sebuah penelitian yang berjudul "Kebijakan Desentralisasi Dan Ketimpangan Capaian Pembangunan Wilayah di Indonesia" penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif-kuantitatif. Hasil analisis menunjukan bahwa terdapat hubungan negatif antara kebijakan desentralisasi fiskal dengan ketimpangan wilayah dan terdapat pengaruh positif dari kebijakan desentralisasi pada konvergensi wilayah.

(Sidig, 2018) melakukan penelitian yang berjudul "Desentralisasi Fiskal Dan Kesenjangan Pendapatan Antar Provinsi di Indonesia" metode Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Ordinary Least Square* (OLS) dan estimasi data panel (*fixed effect – random effect estimation*) terhadap data DAU dan DBH per kapita serta koefisien Gini dari 33 provinsi di Indonesia dari tahun 2007-2016. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan dalam mengurangi kesenjangan antar provinsi di Indonesia. (Sabilla & Kirana Jaya, 2014) melakukan sebuah penelitian yang berjudul "Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Per Kapita Regional di Indonesia". Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi per kapita regional di seluruh provinsi di Indonesia. Desentralisasi fiskal signifikan secara statistic dan memiliki arah hubungan positif terhadap variable dependem, PDRB per kapita. Tenaga kerja sebagai salah satu factor produksi dalam negeri berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi per kapita regional. Perdagangan internasional tidak berpengaruh atau bahkan berpengaruh negative terhadap pertumbuhan ekonomi per kapita reginal. Variabel rasio impor terhadap PDRB tidak berpengaruh.

(Wibowo & Oktivalerina, 2022) melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan pasa Kabupaten/Kota: Studi Kasus Indonesia pada 2010-2018". Penelitian ini menggunakan model data panel yang diolah denga STATA, model

ekonometrika yang digunakan adalah Fixed Effect Model. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat hubungan negatif dan signifikan antara desentralisasi fiskal dan pengurangan Tingkat kemiskinan secara nasional (seluruh kab/kota) dan Kawasan barat Indonesia. Dampak desentralisasi fiskal terhadap kemiskikan tidak signifikan bagi Kawasan timur Indonesia.

(Wijono & Ratnamulyani, 2011) melakukan penelitian yang berjudul "Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadao Tingkat Ketimpangan Pendapatan Untuk Provinsi di Indonesia". Hasil dari penelitian ini menunjukan Indeks ketimpangan pendapatan antar propinsi di Indonesia dengan indikator PDRB konstan 1993 berada pada kondisi ketimpangan yang tinggi terkecuali pada tahun 1998-1999 yang berada pada kondisi ketimpangan sedang. Desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap Tingkat ketimpangan pendapatan antar provinsi di Indonesia. Ketimpangan transfer fiskal berpengaruh negatif terhadap dan signifikan secara statistic terhadap ketimpangan pendapatan. Ketimpangan PAD berpengaruh positif dan signifikan secara statistic terhadap ketimpangan pendapatan. (Wardhana et al., 2013) melakukan penelitian yang berjudul "Dampak Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Penurunan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia". Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel, dengan periode tahun 2002-2010, data yang digunakan adalah data 32 provinsi di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukan variable DAU dan DAK infrastrutktur jalan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

(Putri & Natha, 2014) melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan" dengan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Penelitian serupa juga dilakukan oleh (Oktaviani et al., 2017) dengan judul "Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Ketimpangan Pembangunan di Provinsi Jambi" menyatakan bahwa secara parsial

Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan sedangkan DAU dan DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Ketimpangan Pendapatan

Menurut (Todaro & Smith, 2015) ketimpangan pendapatan merupakan distribusi total pendapatan nasional yang tidak proposional antar rumah tangga. Ukuran agregat ketimpangan pendapatan antara 0 (kesetaraan sempurna) sampai 1 (ketidaksetaraan sempurna). Menurut Bank Dunia (Kuncoro, 2006 : 139) kriteria penilaian distribusi pendapatan atas pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk berpendapatan rendah. Ketimpangan pendapatan dikategorikan:

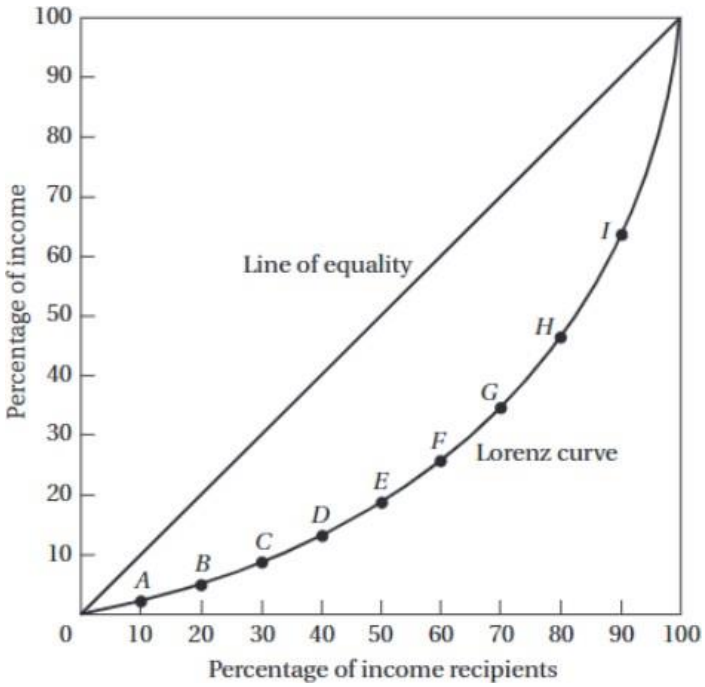
a. Tinggi bila 40% penduduk berpenghasilan terendaah menerima kurang dari 12% bagian pendapatan.
b. Sedang bila 40% penduduk berpenghasilan terendah menerima 12 hingga 17% bagian pendapatan.
c. Rendah bila 40% penduduk berpenghasilan terendah menerima lebih dari 17% bagian pendapatan.

Menurut Adelman dan Cynthia (Arsyad, 1988) secara umum penyebab adanya ketimpangan pendapatan pada negara-negara berkembang yaitu: pertumbuhan penduduk yang tinggi, inflasi, ketidakmerataan pembangunan daerah, investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (*capital intensive*) sehingga pendapatan dari harta tambahan besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja yang pada akhirnya akan mengakibatkan pengangguran akan bertambah, rendahnya mobilitas sosial, pelaksanaan kebijakan subtitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis, memburuknya nilai tukar (*terms of trade*), dan hancurnya industri-industri kerajinan rakyat.

A. Kurva Lorenz

Kurva Lorenz menunjukkan hubungan kuantitatif antara persentase penduduk dan persentase pendapatan yang masyarakat terima. Pada Gambar 2.2. terlihat titik A menunjukkan bahwa 10 persen penduduk dengan pendapatan terendah yang hanya menerima 1,8 persen dari jumlah pendapatan. Titik B menunjukkan bahwa 20 persen penduuk terbawah menerima 5 persen dari jumlah pendapatan, begitu pun dengan seterusnya.

Semakin jauh kurva lorenz dari garis diagonal (kemertaan sempurna), maka semakin tinggi derajat ketidakmerataan yang ditunjukkan. Semakin tinggi derajat ketidakmerataan, kurva lorenz



Sumber: Todaro dan Smith, 2015

Gambar 2. 1 Kurva Lorenz

akan terus melengkung (cembung) dan semakin mendekati garis sumbu horizontal sebelah bawah (Arsyad, 1999 : 229-231).

B. Indeks Gini

Menurut (Kuncoro, 2006) indeks gini sering digunakan sebagai indikator ketimpangan. Hal yang menarik dari indeks gini ini yaitu pendekatannya yang sangat langsung terhadap ukuran ketidakmerataan, memuat perbedaan diantara setiap pasangan pendapatan, yang sejauh ini merupakan ukuran ketidakmerataan ekonomi yang paling populer. Ketimpangan yang rendah mempunyai nilai Indeks Gini sebesar 0,4 atau dibawahnya. Ketimpangan yang tinggi apabila mempunyai Indeks Gini diatas 0,4 dalam distribusinya.

2.2.2. Desentralisasi Fiskal

Menurut Prawirosetoto (Pujiati, 2006) Desentralisasi fiskal merupakan proses pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan dan wewenang dalam mengambil keputusan di bidang fiskal yang didalamnya terdapat aspek penerimaan (*tax assignment*) dan aspek pengeluaran (*expenditure assignment*). Desentralisasi fiskal ini dikaitkan dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam menyediakan barang dan jasa publik (*public goods/publik service*).

Menurut (Litvack & Seddon, 1999 : 3-4) tanggung jawab keuangan merupakan bagian dari komponen desentralisasi. Jika pemerintah daerah ingin melaksanakan fungsi desentralisasi secara efektif, maka harus memiliki pendapatan yang memadai yang diperoleh diperoleh dari pemerintah pusat dan kewenangan dalam membuat keputusan pengeluaran. Desentralisasi fiskal dapat diambil dari berbagai bentuk, termasuk:

A. Pembiayaan bersama, pengguna berkontribusi dalam penyediaan layanan dan infrastruktur misalnya pembangunan jalan raya.

Masyarakat setempat bisa menyumbangkan tanah mereka untuk pembangunan jalan, dan pemerintah memberikan bantuan teknis dan pengawasan proyek.

B. Meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak penjualan atau pajak properti.

C. Transfer antar pemerintah dari pendapatan umum (pajak) yang dikumpulkan pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Peran yang ditetapkan dari tingkat pemerintahan yang terdesentralisasi dalam fungsi alokasi sangat signifikan, terutama karena permintaan akan berbagai layanan publik disetiap daerah tidak dapat dianggap seragam. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan melalui desentralisasi dapat terjadi karena penduduk di berbagai wilayah hukum dapat memilih kombinasi yang paling sesuai antara barang publik dan pajak sesuai dengan preferensi mereka (Negara & Khoirunurrofik, 2021).

2.2.3. Jumlah Penduduk

Menurut Sukirno (2014), Perkembangan penduduk yang semakin tinggi akan berdampak pada penghambatan negara berkembang untuk mencapai tujuan penting dalam pembangunan ekonomi, yaitu pemerataan pendapatan. Pertumbuhan pasar barang dan jasa dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat dan jumlah populasi. Namun, jumlah penduduk juga dapat menjadi hambatan bagi pembangunan karena dapat mengurangi produktivitas dan menyebabkan pengangguran. Ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan memperluas kesenjangan pendapatan.

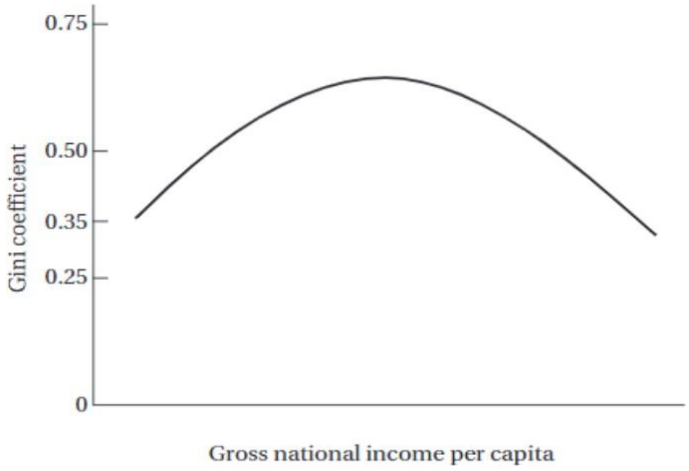
Menurut Arsyad (1999), Ada delapan faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam distribusi pendapatan di Negara Sedang Berkembang. Salah satu faktornya adalah tingginya pertumbuhan penduduk, yang mengakibatkan penurunan pendapatan per kapita.

Pertumbuhan populasi yang tinggi tetapi tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas akan menghasilkan daya beli masyarakat yang rendah, sehingga pendapatan per kapita menurun.

2.2.4. PDRB Per Kapita

Menurut Kuznets (Kuncoro, 2006 : 150) hipotesis kurva U terbalik (*inverted U curve*) ketimpangan pendapatan terjadi pada saat awal mula ketika pembangunan dimulai, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu distribusi pendapatan akan merata. Kurva Kuznet U terbalik karena terdapat perubahan longitudinal (*time series*) dalam distribusi pendapatan.

Kurva Kuznets digambarkan untuk menjelaskan bagaimana distribusi pendapatan pada masa perubahan dari ekonomi pedesaan ke ekonomi perkotaan atau industri. Pada saat memasuki awal pembangunan, ketimpangan pendapatan akan cenderung meningkat karena adanya aktivitas urbanisasi. Namun, ketika sektor industri perkotaan mampu menyerap banyak pekerjaan dari pedesaan,



Sumber: Todaro dan Smith, 2015

Gambar 2. 2 Kurva U Terbalik

ketimpangan distribusi pendapatan cenderung menurun menuju akhir proses pembangunan.

Pada gambar 2.1 Kuznets (kurva U terbalik) menemukan hubungan antara ketimpangan pendapatan dan tingkat pendapatan perkapita yang berbentuk U terbalik. Dalam jangka pendek, terdapat hubungan positif antara pertumbuhan pendapatan perkapita dengan ketimpangan pendapatan. Namun, dalam jangka panjang, hubungan antara pendapatan perkapita dengan ketimpangan pendapatan menjadi negatif.

2.3. Hubungan Antar Variabel

2.3.1. Hubungan Dana Alokasi Umum Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh yang negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Ketika jumlah Dana Alokasi Umum ditingkatkan maka ketimpangan pendapatan di Indonesi akan semakin berkurang (Ridho & Wijayanti, 2022).

Penelitian yang dilakukan (Violin & Lutfi, 2022) menyatakan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan antar daerah, artinya pada saat nilai DAU meningkat maka indeks ketimpangan antar daerah akan mengalami peningkatan. DAU berpengaruh negatif terhadap ketimpangan yang artinya semakin meningkat DAU akan menyebabkan ketimpangan mengalami peningkatan (Adriana, 2023).

2.3.2. Hubungan Dana Alokasi Khusus Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Penelitian yang dilakukan (Ridho & Wijayanti, 2022) menyatakan bahwa Variabel DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Permasalahan dalam pengalokasian dan penggunaan DAK ikut menyebabkan proses pwmbangunan daerah tidak berjalan optimal

sehingga tidak mampu memberikan pengaruh terhadap Upaya pengentasan ketimpangan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Violin & Lutfi, 2022) menyatakan bahwa DAK berpengaruh signifikan terhadap tingkat ketimpangan antar daerah, pada saat nilai DAK meningkat, maka indeks ketimpangan daerah akan mengalami penurunan. DAK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan (Adriana, 2023).

2.3.3. Hubungan Dana Bagi Hasil Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Penelitian yang dilakukan (Ridho & Wijayanti, 2022) menyatakan bahwa variable DBH tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap ketimpangan daerah jambi tahun 2010-2019. Variable DBH tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat ketimpangan antar daerah sehingga peningkatan atau penurunan nilai DBH cenderung tidak mempengaruhi indeks ketimpangan antar daerah (Violin & Lutfi, 2022).

Penelitian yang dilakukan (Oktaviani *et al.,* 2017)menyatakan DHB berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan, jika relasi dana perimbangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat mengalami peningkatan setiap tahunnya maka akan berdampak terhadap ketimpangan yang akan terjadi pada masing-masing daerah.

2.3.4. Hubungan Jumlah Penduduk Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Jumlah penduduk memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Yang artinya, jumlah penduduk tidak selalu menjadi penyebab terjadinya kenaikan Tingkat pendapatan. Karena kurangnya penyerapan tenaga kerja dalam sektor perekonomian sehingga kurangnya pengaruh yang signifikan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan. Penyerapan tenaga kerja yang relative kecil jika dibandingkan dengan Angkatan kerja dari jumlah penduduk di setiap

provinsi akan menyebabkan ketimpangan pendapatan meningkat (Julihanza, 2023).

Penelitian yang dilakukan (Violin & Lutfi, 2022) menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, populasi adalah factor yang menghambat Pembangunan, karena memberikan penurunan produktivitas dan penampilan banyak pengangguean yang akhirnya pengangguran mengakibatkan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

2.3.5. Hubungan PDRB Terhadap Ketimpangan Pendapatan

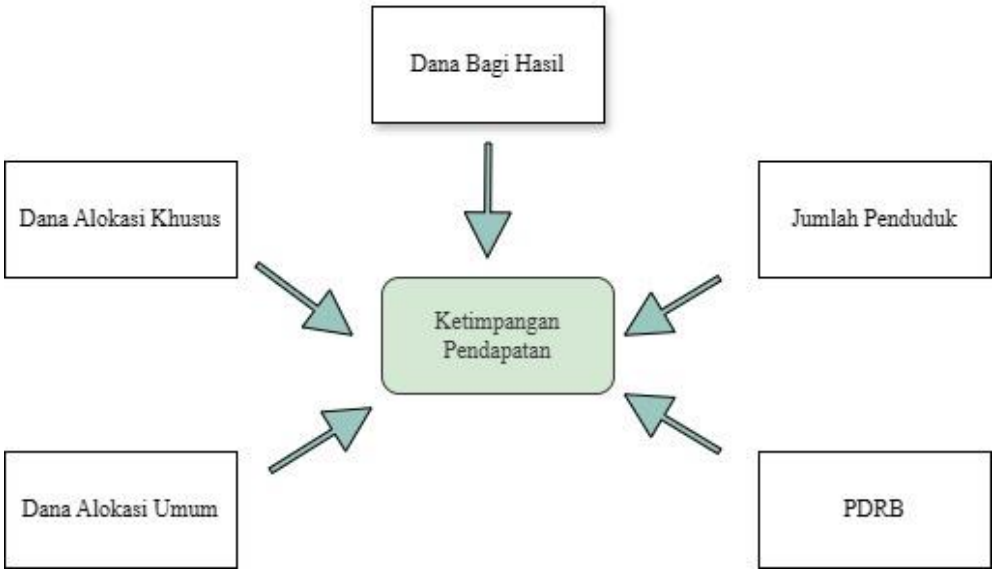
Penelitian yang dilakukan oleh (Kharisma & Hanifah, 2020) menyatakan bahwa variabael laju pertumbuhan PRDB berpengaruh positif terhadap ketimpangan. Kondisi ini disebabkan oleh perbedaan tingkat pembangunan yang menyebabkan terjadinya ketimpangan. Penelitian yang serupa dilakukan oleh (Fitri, 2018) menyatakan bahwa PDRB perkapita tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan provinsi di Indonesia tahun 2012-2016.

Penelitian yang dilakukan oleh (Abubakar *et a*l., 2022) menyataka bahwa PDRB memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variable ketimpangan pendapatan. Secara simultkan Produk Domestrik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap tinkat ketimpangan pendapatan yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara parsial PDRB tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan (Raziq & El Hasanah, 2023).

2.4. Kerangka Berfikir

Berdasarkan kajian Pustaka dan landasan teori di atas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat menjelaskan bahwa variable Dana Alokasi

Umum, Dana Alokasi Khusus Dana Bagi Hasil, Produk Domestik Regional Bruto, dan Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan Berikut gambar kerangka pemikiran diatas.



Gambar 2. 3 Kerangka Berfikir

2.5. Hipotesis

Hipotesis merupaka jawaban sementara dari permasalahan yang menjadi objek penelitian yang diangkat olej penulis, hipotesis ini kebenarannya masih perlu dibuktikan atau diuji secara empiris. Berdasarkan dengan perumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

A. Diduga Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh negatif terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia tahun 2013-2022.
B. Diduga Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh positif terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia tahun 2013-2022.
C. Diduda Dana Bagi Hasil di Indonesia memiliki pengaruh negatif terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia tahun 2013-2022.
D. Diduga Produk Domestik Regional Bruto memiliki pengaruh negatif terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia tahun 2013-2022.
E. Diduga Jumlah Penduduk memiliki pengaruh positif terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia tahun 2013-2022.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Cara Pengumpulan Data

Penelitian ini menganalisis kebijakan desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia tahun 2013-2022 menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitaif yang menjelaskan kedudukan antar variabel yang menggunakan Analisa data untuk mencari perbandingan variabel dan hubungan dengan variabel lainnya.

Penelitian kuantitaif merupakan penelitian yang dilakukan dengan alat untuk olah data menggunakan statistik yang Dimana komponen masalah pada beberapa variabel yang di setiap variabelnya ditentukan oleh simbol yang berbeda disesuaikan kebutuhan atau masalah yang sedang diteliti oleh penulis. Pengukuran penelitian kuantitatif adalah bagian yang terpenting dalam menentukan kesompulan akhir untuk melihat hubungan antar variabel penelitian (Sahir, 2022).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang di dapatkan dari kajian literatur, penelitian terdahulu, buku, serta sumber data yang di publikasikan oleh instansi pmerintahan seperti Badan Pusat Statistik, SIMREG BAPPENAS, dan DJPK Kemenkeu. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data panel, gabungan antara data (*time series*) dan data (*cross section*) di 34 Provinsi di Indonesia selama periode 2010-2022. Berikut rincian data pada laporan :

Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Satuan	Simbol	Sumber Data
Dana Alokasi Umum	Milyar Rupiah	DAU	SIMREG BAPPENAS

Dana Alokasi Khusus	Milyar Rupiah	DAK	SIMREG BAPPENAS
Dana Bagi Hasil	Milyar Rupiah	DBH	SIMREG BAPPENAS
Jumlah Penduduk	Jiwa	JP	BPS
Produk Domestik Regional Bruto atas Harga Konstan	Milyar Rupiah	PDRB	BPS

3.2. Definisi Variabel

Penelitian ini menggunakan variable yang meliputi varuabek dependen (Y) dan variable independen (X). Variabel dependen pada penelitian ini yaitu Ketimpangan Pendapatan, sedangkan variable independen dalam penelitian ini yaitu Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Produk Domestik Regional Bruto dan Jumlah Penduduk.

3.3. Metode Analisis

Penelitian ini dilakukan di 34 Provinsi di Indonesia metode penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini yaitu metode pendekatan kuantitatif dengan data variabel dependen Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini Ratio) tahun 2013-2022. Penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan bantuan alat ukur *software e-views* 12.

Data panel merupakan gabungan antara data silang (*cross-section*) dengan data runtut waktu (*time series*). Data panel juga disebut sebagai data longitudinal

atau data runtut waktu silan (*cros-sectional time series*). Dalam penggunaan data panel menjelaskan dua informasi yaitu informasi antara uji (*cross-section*) terhadap perbedaan antar subjek dan informasi antar waktu (*time series*) yang menggambarkan perubahan terhadap subjek waktu. Menggunakan regresi data panel akan memberukan hasil analisis yang lebih baik secara statistic karena adanya penggabungan data *cross section* dan *time series* yang nantinya akan menghasilkan degree of freedom yang lebih besar dan akan mengatasi persoalan penghilangan variabel (*omitted variabel*) (Sriyana, 2014 : 77-80).

Persamaan model regresi data panel dapat dirumuskan dalam model berikut :

$$GR_{it} = \beta_0 + \beta_1 DAU_{it} + \beta_2 DAK_{it} + \beta_3 DBH_{it} + \beta_4 JP_{it} + \beta_5 PDRB_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

GR_{it} = *Gini Ratio* (Ketimpangan Pendapatan)

it = Provinsi *i* tahun ke-*t*

β_0 = Intercept/Konstanta

$\beta_1, \ldots \ldots \beta_n$ = Koefisien Regresi

DAU_{it} = Dana Alokasi Umum

DAK_{it} = Dana Alokasi Khusus

DBH_{it} = Dana Bagi Hasil

JP_{it} = Jumlah Penduduk

$PDRB_{it}$ = Produk Domestik Regional Bruto atas Harga Konstan

e_{it} = *Error term*

3.4. Estimasi Model Regresi Data Panel

Estimasi merupakan tahapan yang sangat penting dalam analisis regresi, termasuk dengan bagian nilai intersepnya. Hal ini adalah hal yang paling utama dalam melakukan analisis regresi data panel yaitu menentukan model yang akan digunakan. Pendekatan yang biasa digunakan dalam regresi data panel yitu, pendekatan dengan model *common effect*, *fixed effect* dan *random effect* (Sriyana, 2014 : 81-82).

3.4.1. Common Effect Model

(Sriyana, 2014 : 83) Model *common effect* menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan nilai intersep dan *slope* pada hasil regresi baik secara waktu maupun antar individu. Model common effect menggabungkan data antara *time series* dengan *cross section* kedalam data panel yang nantinya di regresi menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Dengan cara menggabungkan data tersebut maka dapat dapat terlihat perbedaan besarnya intersep dan *slope* antar individu atau antar waktu. Model regresi data panel pada analisis ini jika diestimasi dengan pendekatan *common effect* dapat dituliskan dengan persamaan, sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 InX_{1it} + \beta_2 InX_{2it} + e_{it}$$

Keterangan :

Y_{it} = Observasi dari bagian ke-1 selanjutnya diamati pada waktu ke-t (yaitu variabel dependen yang merupakan data panel).

X_{1it} = Variabel independen dari bagian ke-1 yang selanjutnya akan diamati pada periode waktu ke-t yang diasumsikan X_{1it} memuat variabel konstanta.

X_{2it} = Variabel independen dari bagian ke-2 yang selanjutnya akan diamati pada periode waktu ke-t yang diasumsikan X_{2it} memuat variabel konstanta.

e_{it} = Komponen error yang diasumsikan mempunyai harga mean 0 dan variasi homoden dalam waktu dan independen dengan X_{it}.

3.4.2. Fixed Effect Model

Fixed Effect atau efek tetap mengasumsikan bahwa satu objek memiliki besar intersep yang konstan untuk berbagai waktu. Hal yang sama juga dengan persamaan regresinya yang besarnya tetap antar individu maupun dari waktu ke waktu (*time invariant*). Salah satu masalah dari model fixed effect ini adalah nilai intersep dan slope yang tidak konstan sulit dipenuhi. Untuk mengatasi permasalahan ini dapat dilakukan dengan memasukan variabel boneka (*dummy variable*) yang tujuannya menjelaskan terjadinya perbedaan parameter yang berbeda-beda antara lintas unit (*cross section*) maupun antar waktu (*time series*). Model *fixed effect* dapat dilakukan regresi menggunakan metode *Least Squares Dummy Variable* (LSDV) (Sriyana, 2014). Adapun persamaan regresinya dapat ditulis sebagai berikut

:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 InX_{1it} + \beta_2 InX_{2it} + e_{it}$$

Pada pendekatan *fixed effect* dapat memasukan variabel *dummy* atau variabel boneka untuk menjelaskan adanya perbedaan antar intersep sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 InX_{1it} + \beta_2 InX_{2it} + \beta_3 D_{1i} + \beta_4 D_{2i} e_{it}$$

Keterangan :

D_{1i} = Variabel dummy 1

D_{2i} = Variabel dummy 2

Kelemahan dari pendekatan *fixed effect* ini yaitu masih adanya kemungkinan ketidak sesuaian model dengan keadaan yang sesungguhnya. Kondisi objek yang berbeda, bahkan kondisi satu objek pada satu waktu

dapat saling berbeda dengan kondisi objek diwaktu lain. Oleh karena itu, diperlukan model yang dapat menunjukan perbedaan antara intersep antar objek, meskipun memiliki nilai koefisien regressor yang sama (Sriyana, 2014 : 126).

3.4.3. Random Effect Model

(Sriyana, 2014 : 153-161) Perbedaan antar unit dan antar periode waktu yang terjadi secara random. Itulah mengapa model *random effect* disebut juga dengan *error compenent model* (ECM). Metode ini diasumsikan bahwa intersep dan *slope* berbeda antar individu dan asumsi kedua bahwa intersep dan *slope* berbeda antar individu dan periode waktu. Keunggulan pada model estimasi random effect yaitu terdapat asumsi bahwa perbedaan intersep dan *slope* melalui transmisi *error/residual* dan dapat menghilangkan heteroskedastisitas.

3.5. Pemilihan Model Estimasi

Pada bagian pemilihan model estimasi terbaik terdapat 2 tahap. Pertama, uji dengan membandingkan antara metode *fixed effect* dengan *commont effect* yang disebut uji *signifikansi fixed effect*. Tahap kedua, uji dengan membandingkan antara metode *fixed effects* dengan *random effects* yang disebut uji Hausman (Sriyana, 2014
: 180).

3.5.1. Uji Chow Test

Dalam uji F ini digunakan dengan tujuan memberikan informasi model yang lebih baik di antara dua Teknik regresi data panel, apakah dengan model *fixed effects* atau dengan regresi data panel tanpa variabel dummy (*common effects*). Cara ini dilakukan dengan melihat nilai residual *sum of squares* (RSS) dari kedua model regresi tersebut. Dalam uji ini dibandingkan antara hipotesis nol (H0) yang menyatakan bahwa intersep dan *slope* adalah tetap (model common effects) dan hipotesis alternatif

(Ha) yang menyatakan *slope* adalah tetap sedangkan intersep berubah-ubah (model fixed effect)

Kesimpulannya adalah :

H_0 : Memilih model *Common Effect*

H_a : memilih model *Fixed Effect*

Adapun asumsi yang digunakan dalam uji chow yaitu sebagai berikut :

$$F = \frac{SSR_R - SSR_{U/q}}{SSR_U/(n - k)}$$

Keterangan :

SSR_R dan SSR_U = *Sum of squared residuals metode effect* dan teknik *fixed effect.*

q = Jumlah restriksi metode *common effect*

n = Jumlah observasi

k = Jumlah parameter estimasi metode *fixed effect*

Jika hasil yang diterima adalaj Ho maka model terbaik yang harus diterapkan adalah estimasi *Common Effect,* dan tidak perlu melanjutkan ke model Random Effect. Namun sebaliknya, jika Ho ditolak, model terbaik yang harus diambil menggunakan *Fixed Effect*, dan kemudian dapat melanjutkan ke model *Random Effect* (Sriyana, 2014).

3.5.2. Uji Hausman

Uji Hausman merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui pilihan model yang lebih baik di antara model *fixed effect* dan *random effect.* Pengujian uji Hausmen dilakukan dengan hopotesis sebagai berikut:

H_0 : Memilih model *Random Effect*

H_a : memilih model *Fixed Effect*

3.6. Uji Hipotesis

Uji Hipotesis dilakukan dengan menggunakan Koefisien Determinasi (R2), pengujian koefisien regresi secara bersama-sama (Uji F-statistik), dan pengujian koefisien regresi secara parsial (Uji t-statistik)

3.6.1. Uji Simultan (Uji F)

Pengujian variabel independent terhadap variabel dependen secara Bersama-sama di uji serempak dengan Uji F. Untuk menguji koefisien regresi secara Bersama-sama antara variabel independent dengan variabel dependen perlu dilakukan untuk membuat hipotesis sebagai berikut :

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$

$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$

Jika nilai f-hitung > f-tabel, artinya secara Bersama-sama variabel independent tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika nilai f-hitung < f-tabel, artinya secara bersama-sama variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependen (Sriyana, 2014 : 58-59).

3.6.2. Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji T)

Uji t-statistik digunakan untuk menilai apakah variabel independent masing-masing memiliki dampak pada variabel dependen dengan asumsi variabel lainnya tetap. Tingkat signifikan ditentukan dengan menggunakan nilai alpha sebesar 5% dengan kriteria pengujian sebagai berikut: Jika nilai t-statistik > t-tabel, makan variabel independent memiliki pengaruh signifikan pada variabel dependen. Sebaiknya, jika nilai probabilitas t-statistik < t-tabel, menunjukan bahwa variabel independent tidak memiliki pengaruh signifikan pada variabel dependen.

3.6.3. Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa baik analisis yang dilakukan, yang ditunjukan oleh nilai R2 dalam bentuk

presentase. Besarnya R2 berasal dari proporsi variabel independent terhadap variabel dependen yang dapat dijelaskan dalam model dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Semakim besar nilai R2 maka semakin erat hubungan antara variabel independent dengan variabel dependen.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Deskriptif

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berbentuk data panel yang merupakan gabungan antara data *cross section* dan *time series*. Data cross section berupa 34 Provinsi di Indonesia, sedangkan data *time series* yaitu tahun 2013- 2022.

Tabel 4. 1 Analisis Deskriptif

	GR	DAU	DAK	DBH	JP	PDRB
Mean	-1,0511	7,1624	6,2091	5,3696	8,3554	11,8208
Median	-1,0498	7,1467	6,5673	5,1357	8,2889	11,7204
Maximum	-0,7985	11,1324	9,3347	11,234	10,807	14,4232
Minimum	-1,4271	2,9957	0,0000	2,5649	6,4645	9,80967
Std. Dev.	0,1158	0,6238	1,5964	1,3825	1,0074	1,09429
Observation	326	326	326	326	326	326

Analisis deskriptif pada tabel 4.1 memperlihatkan jumlah observasi untuk 34 Provinsi di Indonesia selama tahun 2013-2022 dengan total 326 observasi. Nilai rata-rata yang didapatkan variabel Gini Ratio selama tahun 2013- 2022 sebesar -1,0511 persen, dengan nilai tertinggi yaitu -0,7985 persen, dan nilai minimum -1,4271 persen. Nilai rata-rata yang diperoleh oleh DAU selama tahun 2013-2022 sebesar Rp. 7,1624 Miliar, dengan nilai tertinggi yaitu Rp.11,1324 Miliar, dan nilai minimum Rp.2,9957 Miliar.

Nilai rata-rata yang didapatkan oleh variabel DAK selama tahun 2013-2022 sebesar Rp.6,2091 Miliar, dengan nilai tertinggi sebesar Rp. 9,3347 Miliar, dan nilai terendah sebesar Rp.0,0000 Miliar. Nilai rata-rata yang didapatkan variable DBH selama tahun 2013-2022 sebesar Rp. 5,3696 Miliar, dengan nilai tertinggi sebesar Rp.11,2340 Miliar, dan nilai terendah Rp. 2,5649 Miliar.

Nilai rata-rata yang didapatkan variabel Jumlah Penduduk selama tahun 2013-2022 sebesar Rp.8,3554 Miliar, dengan nilai tertinggi sebesar Rp.10,8078 Miliar, dan nilai terendah Rp.6,4645 Miliar. Nilai rata-rata yang didapatkan

variabel PDRB selama tahun 2013-2022 sebesar Rp.11,8208 Miliar, dengan nilai tertinggi Rp.14,4232 Miliar, dan nilai terendahi Rp.9,8096 Miliar.

4.2. Pemilihan Model Terbaik

Dalam metode estimasi model regresi untuk data panel terdapat tiga pendekatan, antara lain model *Common Efect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Model regresi dengan hasil terbaik model tersebut yang akan digunakan untuk menganalisis data pada penelitian. Maka dalam penelitian ini untuk mengetahui model terbaik yang akan digunakan dalam menganalisis apakah dengan model *Pooled Least Square* (PLS), *Fixed Effext Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM), maka dilakukan pengujian terlebih dahulu menggunakan uji Chow dan uji Hausman.

4.2.1. Uji Chow (Uji F-test)

Uji Chow dilakukan untuk membandingkan model terbaik antara *common effect* dengan *fixed effect*. Dalam pengujian Chow ini apabila nilai F- statistik > F-tabel maka model yang digunakan yaitu *Fixed Effect*.

Tabel 4. 2 Hasi Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f	Prob.
Cross-section F	44,223432	(33,287)	0,0000
Cross-section Chi-square	588,695452	33	0,0000

Berdasarkan table 4.2. hasil uji Chow diatas, didapatkan nilai probabilitas f-statistik sebesar 0,0000 > α = 5% atau 0,05 yang artinya menolak H_0 sehingga model terbaik yang digunakan yaitu model *fixed effect* lebih baik dibandingkan dengan *Common Effect Model*.

4.2.2. Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan dengan tujuan untuk membandikan model terbaik antara *random effect* dengan *fixed effect*. Dalam pengujian Chow ini apabila nilai probabilitas <0,05 maka model yang digunakan yaitu *fixed effect*.

Tabel 4. 3 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	56,787912	5	0,0000

Berdasarkan table 4.3 hasil uji Hausman, didapatkan hasil probabilitas Chi-Sq statistik sebesar o,oooo < α = 5% atau 0,05 yang artinya menolak H_0. Sehingga model terbaik yang dipilih yaitu *Fixed Effect Model* jauh lebih baik dibandingkan dengan *Random Effect Model*.

Hasil dari perbandingan pengujian kedua model yaitu Uji Chow dan Uji Hausman yang nantinya akan menjadi acuan dalam hasil regresi data panel yang telah terpilih menjadi model terbaik adalah *Fixed Effect Model*.

4.3. Analisis Model Terbaik

Tabel 4. 4 Model Terbaik Fixed Effect Model

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.419053	0,324517	4,372819	0,0000
LOGDAU	-0,016047	0,006849	-2,343033	0,0198
LOGDAK	-0,002819	0,002720	-1,036367	0,3009
LOGDBH	-0,006946	0,004139	-1,678023	0,0944
LOGJP	0,006016	0,012561	0,478935	0,6323
LOGPDRB	-0,198863	0,027901	-7,127390	0,0000
R-squared	0,861369	F-statistic	46,92766	

Adjusted R-squared	0,843014	Prob(F-Statistic)	0,000000	

Berdasarkan hasil pengujian Random Effect Model pada tabel 4.3 diatas didapatkan model regresi pada penelitian ini yaitu :

$$GR_{it} = \beta_0 + \beta_1 DAU_{it} + \beta_2 DAK_{it} + \beta_3 DBH_{it} + \beta_4 JP_{it} + \beta_5 PDRB_{it} + e_{it}$$

$$GR_{it} = 1.419053 - \beta_1 0{,}016047_{it} - \beta_2 0{,}002819_{it} - \beta_3 0{,}006946_{it} + \beta_4 0{,}006016_{it} - \beta_5 0{,}198863_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

GR_{it} = *Gini Ratio* (Ketimpangan Pendapatan)

it = Provinsi *i* tahun ke-*t*

β_0 = Intercept/Konstanta

$\beta_1, \ldots \ldots \beta_n$ = Koefisien Regresi

DAU_{it} = Dana Alokasi Umum

DAK_{it} = Dana Alokasi Khusus

DBH_{it} = Dana Bagi Hasil

JP_{it} = Jumlah Penduduk

$PDRB_{it}$ = Produk Domestik Regional Bruto atas Harga Konstan

e_{it} = *Error term*

4.3.1. Uji F (Simultan)

Uji f-ststistik dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh seluruh variabel independent secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil dari uji F atau simultan dapat dilihat pada tabel

4.4 dengan cara membandingkan nilai probabilitas F dengan nilai alpha 0,1. Hipotesis untuk uji simultan yaitu sebagai berikut:

H_0: $\beta DAU = \beta DAK = \beta DBH = \beta PDRB = \beta JP = 0$, Artinya semua variabel independen tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia tahun 2013-2022.

H_1: $\beta DAU \neq \beta DAK \neq \beta DBH \neq \beta PDRB \neq \beta JP \neq 0$, Artinya semua variabel independen berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia tahun 2013-2022.

Berdasarkan tabel 4.3 hasil estimasi model terbaik diatas, diperoleh nilai Prob(F-statistic) sebesar 0.000000 < α = 10% atau 0.1 sehingga menolak H_0 dapat disimpulkan bahwa semua variabel independent dalam penelitian ini secara bersama-sama berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia tahun 2013-2022. Dari hasil estimasi diatas didapatkan nilai f-statistic sebesar 46,92 > f-tabel 2,25 sehingga menolak H0 yang dapat disimpulkan bahwa variabel independent secara bersama-sama berpengaruh terdahap ketimpangan pendapatan di Indonesia tahun 2013-2022.

4.3.2. Uji T (Parsial)

Uji parsial (Uji t) dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai t-hitung dengan nilai t-tabel. Pengujian dari uji parsial menunjukan adanya pengaruh dari kelima variabel independent, yaitu Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Produk Domestik Regional Bruto, dan Jumlah Penduduk serta membandingkan nilai prob terhadap nilai alpha 10% atau 0,1.

A. Uji Dana Alokasi Umum terhadap Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan hasil regresi *Fixed Effect Model* diperoleh nilai probabilitas pada variabel Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 0.0198 < α = 10%, maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum

berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan 34 Provinsi di Indonesia tahun 2013-2022.

B. Uji Dana Alokasi Khusus terhadap Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan hasil regresi *Fixed Effect Model* diperoleh nilai probabilitas pada variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 0.300 > α = 10%, maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan 34 Provinsi di Indonesia tahun 2013-2022.

C. Uji Dana Bagi Hasil terhadap Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan hasil regresi *Fixed Effect Model* diperoleh nilai probabilitas pada variabel Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 0.0944 < α = 10%, maka dapat disimpulkan bahwa Dana Bagi hasil berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia tahun 2013-2022.

D. Uji Jumlah Penduduk Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan hasil regresi *Fixed Effect Model* diperolah nilai probabilitas pada variabel Jumlah Penduduk (JP) sebesasar 0.6323 > α =10%, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia tahun 2013-2022.

E. Uji Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan hasil regresi *Fixed Effect Model* diperoleh nilai probabilitas pada variabel Produk domestik regional Bruto (PDRB) sebesar 0.000 < α = 10%, maka dapat disimpulkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia tahun 2013-2022.

4.3.3. Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi ini dilakukan untuk menilai sejauh mana kemampuan model yang ada didalam penelitian inin menjelaskan variasi

variabel dependennya. Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 4.3 didapatkan hasil bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 0,86. Hal ini bahwa 86% variabel Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, PDRB dan Jumlah penduduk mampu menjelaskan variabel Ketimpangan Pendapatan di Indonesia, sedangkan 14% dijelaskan oleh variabel diluar model penelitian ini.

4.4. Pembahasan Hasil

4.4.1 Analisis Pengaruh DAU Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan terbukti bahwa dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia tahun 2013-2022 dengan nilai koefisien sebesar -0,016047 dan nilai probabilitas 0,0198 < alpha 10%. Hal ini menyebabkan penurunan pada ketimpangan pendapatan dimana saat DAU naik sebesar satu persen maka akan menurunkan ketimpangan pendapatan sebesar 0.02%. Pengalokasian DAU yang digunakan oleh pemerintah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah umtuk mendanai kebutuhan daerah digunakan dengan tepat. Sesuai dengan UU no 33 tahun 2004 besaran DAU yang ditetapkan dalam APBN minimal 26% dari PDN neto.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Amalia, 2023) dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan 1 juta rupiah DAU akan menjadikan bertambahkan nilai kesenjangan pendapatan masyarakat, pada saat nilai DAU meningkat maka indeks ketimpangan antar daerah juga akan mengalami peningkatan. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini selaras dengan hipotesis awal karena berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia dan hipotesis penelitian dapat diterima.

4.4.2 Analisis Pengaruh DAK Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan terbukti bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia tahun 2013-2022 dengan nilai koefisien sebesar -0,002819 dan nilai probabilitas 0,3009 > alpha 10%. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya penerimaan DAK di Indonesia belum mampu untuk mengatasi masalah ketimpangan pendapatan. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak selaras dengan hipotesis awal yang mengatakan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ridho & Wijayanti, 2022) dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini disebabkan karena Ketika jumlah dana alokasi khusus ditingkatkan oleh pemerintah maka masih belum mampu mengurangi ketimpangan pendapatan di Indonesia. Arah kegiatan pada berbagai bidang yang dibiayai oleh DAK tidak mampu berpengaruh secara langsung terhadap penigkatan pendapatan Masyarakat.

4.4.3 Analisis Pengaruh DBH Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan terbukti bahwa dana bagi hasil berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia tahun 2013-2022 dengan nilai koefisien sebesar -0,006946 dan nilai probabilitas 0,0944 < alpha 10%. Hal ini menyebabkan penurunan pada ketimpangan pendapatan dimana saat DBH naik sebesar satu persen maka akan menurunkan ketimpangan pendapatan sebesar 0,007%. Tinggi rendahnya Dana Bagi Hasil yang diterima mampu untuk menurunkan ketimpangan pendapatan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena pengalokasian DBH untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik digunakan secara baik dan efektif dalam mengatasi ketimpangan antar daerah di Indonesia, agar setiap daerah memiliki kekuatan keuangan yang sama sehingga dapat memperkecil ketimpangan yang terjadi di antar daerah Indonesia.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ridho & Wijayanti, 2022) dana bagi hasil pajak tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini disebabkan alokasi dana bagi hasil pajak yang diterima oleh

pemerintah daerah juga tidak dapat memberikan dampak terhadap Upaya pengurangan ketimpangan pendapatan. Daerah yang infrastrukturnya sudah maju dan kemampuan ekonomi nya lebih tinggi cenderung akan menerima porsi DBH Pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang masih terbelakang. Porsi DBH pajak yang diterima oleh seluruh kabupaten/kota di luar daerah sangatlah kecil, hal ini membuat daerah yang tertinggal kesulitan dalam memenuhi kebutuhan daerahnya meskipun sudah menerima dana bagi hasil pajak.

4.4.4 Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terbukti bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh pada tingkat ketimpangan di Indonesia tahun 2013-2022 dengan nilai koefisien sebesar 0,006016. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Wardhana *et al*., 2013) jumlah penduduk berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini disebabkan setiap kenaikan satu persen jumlah penduduk maka akan meningatkan ketimpangan pendapatan. Adanya penambahan jumlah penduduk membuat ketimpangan pendapatan semakin bertambah tinggi. Pesatnya jumlah penduduk usia non produktif menjadikan beban bagi penduduk usia kerja untuk membiayai jumlah penduduk non produktif.

4.4.5 Analisis Pengaruh PDRB Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terbukti produk domestic regional bruto berpengaruh negatif terhadap tingkat pendapatan di Indonesia tahun 2013-2022 dengan nilai koefisien sebesar -0,198863 dan nilai probabilitas sebesar 0,0000 < alpha 10%. Hal ini menyebabkan penurunan pada ketimpangan pendapatan dimana saat variabel PDRB naik sebesar satu persen maka akan menurunkan ketimpangan pendapatan sebesar 0.20%. Hal ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan ekonomi yang pesat dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan membuka akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Hal ini pada akhirnya akan membantu masyarakat untuk mengurangi ketimpangan pendapatan di Indonesia sehingga mewujudkan pembangunan daerah yang sukses dan menurunkan jumlah pengangguran.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nora Herlina *et al.*, 2022) Produk domestik regional bruto sektor premier berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia pada tahun 2010-2020. Hal ini dikarenakan meskipun pendapatan di sektor primer tergolong kecil, bekerja di sektor ini dapat membantu memeratakan pendapatan dibandingkan dengan kondisi pengangguran yang sama sekali tidak memperoleh penghasilan. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan pendapatan antara mereka yang bekerja dan mereka yang tidak bekerja. Bagi mereka yang bekerja, meskipun pendapatannya kecil, mereka masih memiliki penghasilan yang dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup.

BAB V
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di 34 Provinsi Di Indonesia tahun 2013-2022 dan berdasarkan hasil analisis dalam bab IV. Dengan variabel Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto di 34 Provinsi di Indonesia dapat disimpulkan pengaruhnya terhadap ketimpangan pendapatan. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

A. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2013-2022.
B. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2013-2022.
C. Hasil penelitian menunjukan bahwa dana bagi hasil berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2013-2022.
D. Hasil penelitian menunjukan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2013-2022.
E. Hasil penelitian menunjukan bahwa produk domestic regional bruto berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2013-2022.

5.2. Implikasi

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka tedapat beberapa implikasi sebagai berikut :

A. Dana Alokasi Umum (DAU) terbukti berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di 34 provinsi di Indonesia tahun 2013-2022.

Hal ini disebabkan karena adanya penambahan 1 juta rupiah DAU akan menjadikan bertambahkan nilai kesenjangan pendapatan masyarakat, pada saat nilai DAU meningkat maka indeks ketimpangan antar daerah juga akan mengalami peningkatan

B. Dana Bagi Hasil (DBH) terbukti berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di 34 provinsi di Indonesia tahun 2013-2022. Daerah yang infrastrukturnya sudah maju dan kemampuan ekonomi nya lebih tinggi cenderung akan menerima porsi DBH Pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang masih terbelakang. Porsi DBH pajak yang diterima oleh seluruh kabupaten/kota di luar daerah sangatlah kecil, hal ini membuat daerah yang tertinggal kesulitan dalam memenuhi kebutuhan daerahnya meskipun sudah menerima dana bagi hasil pajak.

C. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbukti berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di 34 provinsi di Indonesia tahun 2013-2022. Jika dilihat dari segi social-politik, rendahnya produktivitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang melambat akan memperlebar ketimpangan kemudian mendorong peningkatan kekisruhan, kriminalitas serta aktivitas perusakan lainnya. Dari sisi tingkat tabungan, peningkatan ketimpangan akan mendorong peningkatan investasi yang sangat berpengaruh terhapat tingkat upah buruh yang didorong oleh terjadinya ketimpangan yang mengakibatkan penuruna investasi yang memperlambat pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, J., Khairani, F., & Safwadi, I. (2022). Pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Investasi Dan Pengangguran Terhadap Pdrb Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2020. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, *5*(2), 11. https://doi.org/10.29103/jeru.v5i2.8309

Adriana, M. (2023). Determinasi Ketimpangan Eilayah Kabupaten /Kota Provinsi Jawa Tengah (2010-2020). *Jurnal Ekonomi Trisakti*, *2*(2), 2117–2128. https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.17448

Amalia, A. (2023). Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Open Trade , dan DAU Terhadap Ketimpangan Pendapatan Sulawesi Utara. *INTEGRAL: Jurnal Inovasi, Teknologi Terapan, Dan Litbang*, *2*(1), 45–54. https://doi.org/10.57122/integral.v2i1.6

Arsyad, L. (1988). *Ekonomi Pembangunan*.

Arsyad, L. (1999a). *Ekonomi Pembangunan* (Keempat). STIE YKPN.

Arsyad, L. (1999b). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. BPFE. Chayyani, N. R.

(2021). *Ketimpangan Pendapatan Dan Pemulihan Ekonomi Nasional*. 1–25. https://www.theindonesianinstitute.com/wp-content/uploads/2021/11/Ketimpangan-Pendapatan-dan-PEN-Nuri.pdf

Dewinda Santi dan Doddy Aditya Iskandar, S., & Artikel, I. (2021). Kebijakan Desentralisasi Dan Ketimpangan Capaian Pembangunan Wilayah Di Indonesia. *Jurnal Syntax Admiration*, *2*(3), 490–506.

Doriza, S., Purwanto, D. A., & Maulida, E. (2012). Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Disparitas Akses Pendidikan Dasar di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, *13*(1), 31–46. https://doi.org/10.21002/jepi.v13i1.25

Fitri, A. (2018). *Ketimpangan Pendapatan Provinsi di Indonesai Tahun 2012-2026*. *1*(1), 23–32. Julihanza, A.

K. R. (2023). Determinan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan*, *12*(1), 25. https://doi.org/10.24036/ecosains.12290857.00

Kharisma, B., & Hanifah, H. (2020). Desentralisasi Fiskal dan Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*, *23*(2), 179. https://doi.org/10.31845/jwk.v23i2.666

Kuncoro, M. (2006). *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah, dan Kebijakan* (Keempat (ed.)). UPP STIM YKPN d/h AMP YKPN.

Lestari, R. A. (2023). Tantangan Desentralisasi Fiskal. *JURNAL ILMU SOSIAL Dan ILMU POLITIK*, *3*(1), 61–67. https://doi.org/10.30742/juispol.v3i1.2890

Litvack, J., & Seddon, J. (1999). *Decentralization Briefing Notes*. World Bank Institute.

Ma'mun, M. S., & Fuadi, F. (2023). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, dan Inflasi Terhadap Kemiskinan. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, *6*(2), 153–165. https://doi.org/10.14710/jdep.6.2.153-165

Negara, B. P., & Khoirunurrofik, K. (2021). Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Konvergensi Pendapatan Perkapita antar Kabupaten/Kota di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, *6*(1), 1–18. https://doi.org/10.33105/itrev.v6i1.185

Oktaviani, W., Zulgani, Z., & Rosmeli, R. (2017). Pengaruh dana perimbangan terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, *6*(3), 105–112. https://doi.org/10.22437/pdpd.v6i3.4505

Pujiati, A. (2006). Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Semarang Era Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, *33*, 61–70.

Puspita, D., & Hamidi, U. S. (2021). DESENTRALISASI FISKAL Dua Dekade Implementasi. *Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 1–289.

Putri, N. P. V. S., & Natha, I. K. S. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi1Umum Dan9Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan. *E-Jurnal EP Unud*, *4*(1), 41–49.

Raziq, K., & El Hasanah, L. L. N. (2023). Analisis determinan ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, *2*(1), 12–21. https://doi.org/10.20885/jkek.vol2.iss1.art2

Ridho, M. A. M., & Wijayanti, D. (2022). Analisis pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil pajak, dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, *1*(1), 71–81. https://doi.org/10.20885/jkek.vol1.iss1.art7

Rochaida, E. (2016). Dampak Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Keluarga Sejahtera Di Provinsi Kalimantan Timur. *Forum Ekonomi*, *18*(1), 14– 24.

Romhadhoni, P., Faizah, D. Z., & Afifah, N. (2019). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Matematika Integratif*, *14*(2), 113. https://doi.org/10.24198/jmi.v14.n2.19262.113-120

Sabilla, K., & Kirana Jaya, W. (2014). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Per Kapita Regional Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, *15*(1), 12–22.

Sahir, S. H. (2022). *Metodologi Penelitian.*

Sidig, D. S. (2018). *Desentralisasi Fiskal dan Kesenjangan Pendapatan antar Provinsi di Indonesia. 1*(1), 978–1001. https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/244/157

Sriyana, J. (2014). *Metode Regresi Data Panel.*

Sukirno, S. (2014). *Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan* (Kedua). Kencana.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (12th Editi). New York University. https://library.fbe.uii.ac.id/index.php?p=show_detail&id=5088&keywords=todar o

Violin, Z. I., & Lutfi, M. Y. (2022). Analisis Ketimpangan Pendapatan Di Pulau Jawa Dan Faktor Yang Mempengaruhinya Tahun 2010- 2019. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, *2*(1), 227–252. https://doi.org/10.25105/jet.v2i1.14740

Wardhana, A., Juanda, B., Siregar, H., & Wibowo, K. (2013). Dampak Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Penurunan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia. *Sosiohumaniora*, *15*(2), 111. https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v15i2.5737

Wibowo, E. A., & Oktivalerina, A. (2022). Analisis Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten/Kota: Studi Kasus Indonesia pada 2010 - 2018. *Bappenas Working Papers*, *5*(1), 97–119. https://doi.org/10.47266/bwp.v5i1.117

Wicaksono, K. (2012). Problematika dan Tantangan Desentralisasi di Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, *94*, 21–28. https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.21-28

Wijono, T. S., & Ratnamulyani, I. A. (2011). Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Tingkat Ketimpangan Pendapatan untuk Provinsi di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora*, *2*(1), 1–13.

Zulyanto, A. (2012). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bengkulu. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan*, *1*(1), 31. https://doi.org/10.24036/ecosains.346557.00

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I. Data Penelitian

Provinsi	Tahun	GR	DAU	DAK	DBH	JP	PDRB
ACEH	2013	0.33	1092	751	255	4811	111756
ACEH	2014	0.33	1201	730	774	4907	113490
ACEH	2015	0.33	1237	709	2060	5002	112666
ACEH	2016	0.34	1263	1300	1579	5096	116374
ACEH	2017	0.32	2060	1508	560	5190	121241
ACEH	2018	0.31	2060	1488	492	5243	126824
ACEH	2019	0.32	2322	1751	640	5316	132070
ACEH	2020	0.31	1956	1765	571	5274	131581
ACEH	2021	0.32	1945	1726	232	5333	135251
ACEH	2022	0.29	1947	969	428	5407	140948
SUMATERA UTARA	2013	0.32	1223	548	424	13590	398727
SUMATERA UTARA	2014	0.31	1349	597	3805	13767	419573
SUMATERA UTARA	2015	0.32	1139	477	3138	13938	440956
SUMATERA UTARA	2016	0.31	1604	3104	4865	14103	463775
SUMATERA UTARA	2017	0.33	2629	3838	525	14262	487531
SUMATERA UTARA	2018	0.31	2629	3936	514	14476	512763
SUMATERA UTARA	2019	0.31	2713	4179	387	14639	539514
SUMATERA UTARA	2020	0.31	2474	4405	474	14799	533746
SUMATERA UTARA	2021	0.31	2545	4261	804	14936	547652
SUMATERA UTARA	2022	0.32	2463	2045	809	15115	573529
SUMATERA BARAT	2013	0.35	1039	64	131	5067	125941
SUMATERA BARAT	2014	0.33	1129	541	1327	5132	133341
SUMATERA BARAT	2015	0.31	1221	627	944	5196	140719
SUMATERA BARAT	2016	0.31	1261	1180	1301	5260	148134
SUMATERA BARAT	2017	0.31	2014	1700	169	5322	155984
SUMATERA BARAT	2018	0.3	2014	1785	132	5412	163996
SUMATERA BARAT	2019	0.3	2076	1858	108	5479	172206
SUMATERA BARAT	2020	0.3	1891	1967	147	5534	169427
SUMATERA BARAT	2021	0.3	1949	1957	188	5580	175001
SUMATERA BARAT	2022	0.29	12526	1109	200	5640	182630
RIAU	2013	0.39	726	39	619	6033	436188
RIAU	2014	0.37	820	437	6685	6188	447987
RIAU	2015	0.36	654	634	75661	6344	448992

RIAU	2016	0.34	738	1422	8369	6501	458769
RIAU	2017	0.32	1457	1608	1772	6658	470984
RIAU	2018	0.34	1465	1641	1722	6718	482065
RIAU	2019	0.33	1548	1918	1687	6835	495607
RIAU	2020	0.32	1432	2003	1841	6394	489996
RIAU	2021	0.32	1503	2000	1942	6493	506472
RIAU	2022	0.32	1455	958	1880	6614	529533
JAMBI	2013	0.32	836	53	247	3286	111766
JAMBI	2014	0.34	948	494	1950	3344	119991
JAMBI	2015	0.34	1009	579	1799	3402	125037
JAMBI	2016	0.34	1070	816	697	3458	130501
JAMBI	2017	0.33	1397	190	118	3515	136502
JAMBI	2018	0.33	1399	939	405	3527	142902
JAMBI	2019	0.32	1433	1071	397	3566	149111
JAMBI	2020	0.31	1288	250	101	3548	148354
JAMBI	2021	0.31	1327	1094	488	3585	153825
JAMBI	2022	0.33	1284	611	671	3631	161718
SUMATERA SELATAN	2013	0.37	870	25	573	7828	232175
SUMATERA SELATAN	2014	0.38	985	63	549	7941	243298
SUMATERA SELATAN	2015	0.33	931	69	578	8052	254045
SUMATERA SELATAN	2016	0.36	1071	148	656	8160	266857
SUMATERA SELATAN	2017	0.36	1697	1951	1623	8267	281571
SUMATERA SELATAN	2018	0.34	1697	2175	1644	8392	298484
SUMATERA SELATAN	2019	0.33	1743	2273	1761	8497	315465
SUMATERA SELATAN	2020	0.33	1568	2336	1956	8467	315129
SUMATERA SELATAN	2021	0.34	1744	2263	1937	8550	326411
SUMATERA SELATAN	2022	0.33	1563	1026	2653	8657	343484
BENGKULU	2013	0.37	854	52	54	1814	34326
BENGKULU	2014	0.35	955	54	51	1844	36207
BENGKULU	2015	0.37	1046	64	36	1874	38066
BENGKULU	2016	0.35	1070	468	53	1904	40077
BENGKULU	2017	0.34	1301	636	73	1934	42074
BENGKULU	2018	0.35	1300	613	66	1948	44164
BENGKULU	2019	0.32	1334	710	64	1971	46345
BENGKULU	2020	0.32	1219	732	73	2010	46338
BENGKULU	2021	0.32	1253	752	91	2032	47854

BENGKULU	2022	0.31	1213	493	124	2060	49916
LAMPUNG	2013	0.35	1060	60	145	7932	180620
LAMPUNG	2014	0.33	1136	49	143	8026	189797
LAMPUNG	2015	0.35	1097	245	105	8117	199537
LAMPUNG	2016	0.35	1321	1652	150	8205	209794
LAMPUNG	2017	0.33	1851	1927	267	8289	220626
LAMPUNG	2018	0.32	1854	2150	216	8378	232166
LAMPUNG	2019	0.33	1906	2158	139	8457	244378
LAMPUNG	2020	0.32	1732	2233	162	9007	240320
LAMPUNG	2021	0.31	1783	2236	229	9081	246966
LAMPUNG	2022	0.31	940	1127	276	9176	257534
KEP. BANGKA BELITUNG	2013	0.3	717	44	61	1315	42191
KEP. BANGKA BELITUNG	2014	0.29	806	43	53	1343	44159
KEP. BANGKA BELITUNG	2015	0.27	897	44	47	1372	45962
KEP. BANGKA BELITUNG	2016	0.28	905	78	50	1401	47848
KEP. BANGKA BELITUNG	2017	0.27	980	436	156	1430	49985
KEP. BANGKA BELITUNG	2018	0.27	1018	464	215	1948	52208
KEP. BANGKA BELITUNG	2019	0.26	1046	492	250	1971	53942
KEP. BANGKA BELITUNG	2020	0.25	942	543	129	2010	52706
KEP. BANGKA BELITUNG	2021	0.24	970	445	245	2032	55370
KEP. BANGKA BELITUNG	2022	0.25	940	297	529	2060	57803
KEP. RIAU	2013	0.38	656	37	198	1861	137264
KEP. RIAU	2014	0.43	698	42	204	1917	146325
KEP. RIAU	2015	0.33	695	43	167	1973	155131
KEP. RIAU	2016	0.35	866	76	240	2028	162853
KEP. RIAU	2017	0.35	1059	570	198	2083	166082
KEP. RIAU	2018	0.33	1150	590	158	2175	173499
KEP. RIAU	2019	0.33	1190	646	103	2241	181878
KEP. RIAU	2020	0.33	1099	723	197	2064	174959

KEP. RIAU	2021	0.33	1129	844	142	2118	180952
KEP. RIAU	2022	0.32	1092	415	733	2179	190164
DKI JAKARTA	2013	0.4	299	0	8863	9970	1296695
DKI JAKARTA	2014	0.43	85	0	9	10075	1373389
DKI JAKARTA	2015	0.42	0	0	5752	10178	1454564
DKI JAKARTA	2016	0.39	0	2883	12030	10278	1539917
DKI JAKARTA	2017	0.4	0	2122	16606	10374	1635359
DKI JAKARTA	2018	0.39	0	2646	15026	10428	1735208
DKI JAKARTA	2019	0.39	483	2796	11585	10504	1836241
DKI JAKARTA	2020	0.4	0	3250	13567	10562	1792291
DKI JAKARTA	2021	0.41	0	3363	13459	10609	1856076
DKI JAKARTA	2022	0.41	0	2783	17988	10680	1953465
JAWA BARAT	2013	0.4	1472	80	1026	45340	1093544
JAWA BARAT	2014	0.39	1687	78	1077	46029	1149216
JAWA BARAT	2015	0.42	1303	19	907	46709	1207232
JAWA BARAT	2016	0.4	1248	7596	1495	47379	1275619
JAWA BARAT	2017	0.39	3011	9119	1504	48037	1343662
JAWA BARAT	2018	0.4	3023	9380	1497	48475	1419624
JAWA BARAT	2019	0.39	3212	10019	1150	4902	1490960
JAWA BARAT	2020	0.39	2964	10854	1593	48274	1453381
JAWA BARAT	2021	0.4	3107	11325	1400	48782	1507746
JAWA BARAT	2022	0.41	3015	4733	2331	49405	1589985
JAWA TENGAH	2013	0.390	1670	83	583	33264	726655
JAWA TENGAH	2014	0.38	1803	79	491	33522	764959
JAWA TENGAH	2015	0.38	1629	58	565	33774	806765
JAWA TENGAH	2016	0.35	1859	5264	779	34019	849099
JAWA TENGAH	2017	0.36	3652	6567	834	34257	893750
JAWA TENGAH	2018	0.35	3652	6512	761	34358	941091
JAWA TENGAH	2019	0.35	3784	6974	564	34552	991517
JAWA TENGAH	2020	0.35	3438	7334	843	36516	965227
JAWA TENGAH	2021	0.36	3432	7467	746	36742	997345
JAWA TENGAH	2022	0.36	3435	3388	1036	37032	1050322
DI YOGYAKARTA	2013	0.41	828	34	89	3594	75627
DI YOGYAKARTA	2014	0.43	899	37	70	3637	79536
DI YOGYAKARTA	2015	0.42	920	39	60	3679	83474
DI YOGYAKARTA	2016	0.42	940	643	113	37209	87686

DI YOGYAKARTA	2017	0.44	1314	967	98	3762	92300
DI YOGYAKARTA	2018	0.42	1314	910	93	3818	98024
DI YOGYAKARTA	2019	0.42	1351	979	56	3868	104485
DI YOGYAKARTA	2020	0.43	1227	1029	114	3668	101699
DI YOGYAKARTA	2021	0.43	1353	1119	0	3712	107373
DI YOGYAKARTA	2022	0.45	1224	607	120	3761	112898
JAWA TIMUR	2013	0.36	1632	48	1134	38363	1192790
JAWA TIMUR	2014	0.4	1866	102	1123	38610	1262684
JAWA TIMUR	2015	0.4	1587	66	1024	38847	1331376
JAWA TIMUR	2016	0.4	1672	5516	1486	39075	1405564
JAWA TIMUR	2017	0.41	3803	7056	1237	39293	1482300
JAWA TIMUR	2018	0.37	3813	6858	1386	39521	1563442
JAWA TIMUR	2019	0.36	3998	7551	1120	39744	1649896
JAWA TIMUR	2020	0.36	3662	7635	1559	40665	1611393
JAWA TIMUR	2021	0.36	3771	8797	1253	40878	1668749
JAWA TIMUR	2022	0.36	3652	3994	3694	41150	1757821
BANTEN	2013	0.38	617	11	494	11452	331099
BANTEN	2014	0.42	728	13	415	11704	349351
BANTEN	2015	0.38	640	17	314	11955	368377
BANTEN	2016	0.39	693	1998	490	12203	387835
BANTEN	2017	0.37	1059	2230	636	12448	410137
BANTEN	2018	0.36	1072	2255	647	12530	433783
BANTEN	2019	0.36	1140	2490	534	12714	456620
BANTEN	2020	0.36	1042	2631	699	11904	441149
BANTEN	2021	0.36	1105	2656	571	12061	460963
BANTEN	2022	0.37	1071	1093	869	12252	484142
BALI	2013	0.440	792	44	131	4056	114104
BALI	2014	0.44	832	42	145	4104	121788
BALI	2015	0.39	831	134	104	4152	129127
BALI	2016	0.37	850	845	172	4200	137296
BALI	2017	0.37	1260	1106	170	4246	144933
BALI	2018	0.36	1268	1043	183	4309	154073
BALI	2019	0.37	1325	1096	127	4362	162693
BALI	2020	0.36	1204	1153	207	4317	147499
BALI	2021	0.37	1241	1413	161	4362	143865
BALI	2022	0.36	1201	614	183	4415	150821

NUSA TENGGARA BARAT	2013	0.34	859	57	149	4710	69767
NUSA TENGGARA BARAT	2014	0.39	980	55	150	4773	73373
NUSA TENGGARA BARAT	2015	0.36	1088	214	134	4835	89338
NUSA TENGGARA BARAT	2016	0.36	1117	1090	328	4896	94524
NUSA TENGGARA BARAT	2017	0.37	1537	1385	172	4956	94608
NUSA TENGGARA BARAT	2018	0.39	1537	1413	147	5078	90349
NUSA TENGGARA BARAT	2019	0.37	1583	1574	125	5152	93872
NUSA TENGGARA BARAT	2020	0.38	1475	1602	174	5320	93289
NUSA TENGGARA BARAT	2021	0.38	1475	1658	158	5390	95438
NUSA TENGGARA BARAT	2022	0.37	1478	1010	494	5473	102074
NUSA TENGGARA TIMUR	2013	0.34	1003	78	83	4 954	51505
NUSA TENGGARA TIMUR	2014	0.35	1131	74	75	5 036	54108
NUSA TENGGARA TIMUR	2015	0.34	1300	101	56	5120	56771
NUSA TENGGARA TIMUR	2016	0.36	1337	1411	88	5203	59678
NUSA TENGGARA TIMUR	2017	0.35	1784	1771	85	5287	62725
NUSA TENGGARA TIMUR	2018	0.35	1827	1788	63	5360	65929
NUSA TENGGARA TIMUR	2019	0.35	1875	2154	37	5437	69389
NUSA TENGGARA TIMUR	2020	0.35	1716	2368	66	5325	68810
NUSA TENGGARA TIMUR	2021	0.33	1783	2336	55	5387	70541
NUSA TENGGARA TIMUR	2022	0.34	1730	1244	73	5466	72695
KALIMANTAN BARAT	2013	0.38	1144	74	132	4641	101980
KALIMANTAN BARAT	2014	0.4	1290	63	127	4716	107115

KALIMANTAN BARAT	2015	0.33	1405	86	108	4789	112347
KALIMANTAN BARAT	2016	0.33	1493	200	142	4861	118183
KALIMANTAN BARAT	2017	0.32	1720	1529	125	4932	124289
KALIMANTAN BARAT	2018	0.32	1724	1508	148	4985	130596
KALIMANTAN BARAT	2019	0.31	1756	1686	109	5045	137243
KALIMANTAN BARAT	2020	0.32	1563	1766	120	5414	134743
KALIMANTAN BARAT	2021	0.31	1624	1938	118	5470	141212
KALIMANTAN BARAT	2022	0.31	572	850	447	5541	148369
KALIMANTAN TENGAH	2013	0.35	1062	63	170	2384	69411
KALIMANTAN TENGAH	2014	0.36	1152	62	145	2439	73725
KALIMANTAN TENGAH	2015	0.3	1280	73	117	2495	78891
KALIMANTAN TENGAH	2016	0.34	1294	241	200	2550	83900
KALIMANTAN TENGAH	2017	0.32	1574	644	123	2605	89545
KALIMANTAN TENGAH	2018	0.34	1574	751	142	2612	94566
KALIMANTAN TENGAH	2019	0.33	1603	962	121	2649	100349
KALIMANTAN TENGAH	2020	0.32	1439	1078	144	2670	98934
KALIMANTAN TENGAH	2021	0.32	1478	1055	118	2702	102481
KALIMANTAN TENGAH	2022	0.3	1431	567	1291	2741	109095
KALIMANTAN SELATAN	2013	0.35	68351	42	196	3855	101851
KALIMANTAN SELATAN	2014	0.32	701	54	171	3923	106779
KALIMANTAN SELATAN	2015	0.33	571	64	136	3990	110863
KALIMANTAN SELATAN	2016	0.35	779	271	209	4056	115744
KALIMANTAN SELATAN	2017	0.34	1106	970	155	4120	121859
KALIMANTAN SELATAN	2018	0.34	1118	936	170	4162	128053

KALIMANTAN SELATAN	2019	0.33	1188	1111	132	4216	133284
KALIMANTAN SELATAN	2020	0.35	1091	1081	193	4073	130864
KALIMANTAN SELATAN	2021	0.32	1129	8	136	4122	135423
KALIMANTAN SELATAN	2022	0.3	1093	612	2792	4182	142339
KALIMANTAN TIMUR	2013	0.36	55	8	826	3870	438533
KALIMANTAN TIMUR	2014	0.36	57	1	663	3969	446029
KALIMANTAN TIMUR	2015	0.31	0	219	639	4068	440676
KALIMANTAN TIMUR	2016	0.32	80	1016	691	4167	439004
KALIMANTAN TIMUR	2017	0.33	714	1107	610	4266	452742
KALIMANTAN TIMUR	2018	0.34	767	1071	599	3573	464694
KALIMANTAN TIMUR	2019	0.33	815	1153	403	3619	486523
KALIMANTAN TIMUR	2020	0.33	831	383	688	3766	472393
KALIMANTAN TIMUR	2021	0.33	856	666	0	3808	484439
KALIMANTAN TIMUR	2022	0.31	828	675	6777	3859	506159
KALIMANTAN UTARA	2013	0.36	55	8	826	3870	44092
KALIMANTAN UTARA	2014	0.36	20	8	105	3969	47696
KALIMANTAN UTARA	2015	0.31	651	60	87	642	49316
KALIMANTAN UTARA	2016	0.3	1032	378	54	666	51065
KALIMANTAN UTARA	2017	0.31	1185	291	47	691	54537
KALIMANTAN UTARA	2018	0.3	1185	339	78	682	57459
KALIMANTAN UTARA	2019	0.29	1209	342	87	695	61418
KALIMANTAN UTARA	2020	0.3	1082	374	82	701	60746
KALIMANTAN UTARA	2021	0.28	1114	61	286	713	63163
KALIMANTAN UTARA	2022	0.27	1079	230	609	727	66534
SULAWESI UTARA	2013	0.44	885	54	84	2360	62422
SULAWESI UTARA	2014	0.43	949	60	70	2386	66361
SULAWESI UTARA	2015	0.36	1026	77	53	2412	70425
SULAWESI UTARA	2016	0.37	1065	713	91	2436	74765
SULAWESI UTARA	2017	0.39	1390	1008	78	2461	79484
SULAWESI UTARA	2018	0.37	1427	957	78	2474	84250
SULAWESI UTARA	2019	0.37	1463	1044	54	2494	89009
SULAWESI UTARA	2020	0.36	1335	1071	79	2621	88126
SULAWESI UTARA	2021	0.35	1374	1072	139	2638	91791
SULAWESI UTARA	2022	0.35	1330	685	268	2659	96768

SULAWESI TENGAH	2013	0.39	994	66	82	2785	68219
SULAWESI TENGAH	2014	0.35	1087	64	62	2831	71678
SULAWESI TENGAH	2015	0.37	1221	251	54	2877	82787
SULAWESI TENGAH	2016	0.34	1272	836	65	2922	91015
SULAWESI TENGAH	2017	0.34	1546	976	59	2966	97475
SULAWESI TENGAH	2018	0.31	1586	949	66	3001	117556
SULAWESI TENGAH	2019	0.33	1637	1207	51	3042	127935
SULAWESI TENGAH	2020	0.32	1488	1266	89	2985	134153
SULAWESI TENGAH	2021	0.32	1542	1254	70	3021	149849
SULAWESI TENGAH	2022	0.3	1494	772	610	3066	172578
SULAWESI SELATAN	2013	0.43	1089	64	257	8342	217589
SULAWESI SELATAN	2014	0.44	1209	73	218	8432	233988
SULAWESI SELATAN	2015	0.4	1180	223	170	8520	250803
SULAWESI SELATAN	2016	0.4	1394	1991	232	8606	269401
SULAWESI SELATAN	2017	0.42	2509	2566	241	8690	288814
SULAWESI SELATAN	2018	0.38	2509	2540	194	8748	309156
SULAWESI SELATAN	2019	0.39	2586	2632	170	8819	330506
SULAWESI SELATAN	2020	0.38	2349	2773	227	9073	328155
SULAWESI SELATAN	2021	0.37	2339	2907	394	9139	343395
SULAWESI SELATAN	2022	0.36	2340	1391	405	9225	360874
SULAWESI TENGGARA	2013	0.39	981	53	67	2396	64269
SULAWESI TENGGARA	2014	0.39	1053	59	62	2448	68292
SULAWESI TENGGARA	2015	0.38	1176	86	47	2499	72993
SULAWESI TENGGARA	2016	0.38	1200	739	61	2551	77746
SULAWESI TENGGARA	2017	0.4	1563	1041	49	2602	83002
SULAWESI TENGGARA	2018	0.39	1575	1165	49	2623	88310
SULAWESI TENGGARA	2019	0.39	1614	1209	33	2663	94054
SULAWESI TENGGARA	2020	0.38	1454	1179	54	2624	93446
SULAWESI TENGGARA	2021	0.39	1504	1273	41	2659	97276
SULAWESI TENGGARA	2022	0.36	1456	758	773	2701	102658
GORONTALO	2013	0.44	652	43	26	1098	19368
GORONTALO	2014	0.45	734	42	23	1116	20776
GORONTALO	2015	0.4	845	68	19	1133	22069
GORONTALO	2016	0.41	884	320	27	1151	23507
GORONTALO	2017	0.4	997	393	22	1168	25090
GORONTALO	2018	0.41	1006	370	20	1166	26719

GORONTALO	2019	0.41	1043	436	14	1176	28430
GORONTALO	2020	0.4	944	445	18	1171	28425
GORONTALO	2021	0.4	971	474	17	1181	29110
GORONTALO	2022	0.42	940	301	27	1192	30286
SULAWESI BARAT	2013	0.32	685	47	39	1234	22227
SULAWESI BARAT	2014	0.37	776	51	28	1258	24196
SULAWESI BARAT	2015	0.36	895	73	23	1282	25964
SULAWESI BARAT	2016	0.37	925	455	28	1306	27525
SULAWESI BARAT	2017	0.33	1008	498	25	1331	29282
SULAWESI BARAT	2018	0.36	1025	454	18	1340	31114
SULAWESI BARAT	2019	0.36	1064	611	13	1359	32844
SULAWESI BARAT	2020	0.35	968	662	16	1419	32074
SULAWESI BARAT	2021	0.36	1001	627	14	1436	32898
SULAWESI BARAT	2022	0.37	972	404	21	1458	33655
MALUKU	2013	0.34	897	53	73	1628	22101
MALUKU	2014	0.33	1019	70	67	1657	23568
MALUKU	2015	0.33	1177	217	51	1686	24859
MALUKU	2016	0.34	1260	730	54	1715	26284
MALUKU	2017	0.32	1555	733	61	1744	27814
MALUKU	2018	0.32	1670	850	41	1749	29457
MALUKU	2019	0.32	1699	843	28	1768	31049
MALUKU	2020	0.32	1524	897	45	1848	30766
MALUKU	2021	0.31	1574	1133	34	1862	31703
MALUKU	2022	0.3	1525	634	97	1881	33322
MALUKU UTARA	2013	0.320	772	70	51	1114	18209
MALUKU UTARA	2014	0.32	906	75	44	1138	19209
MALUKU UTARA	2015	0.28	1061	147	38	1162	20380
MALUKU UTARA	2016	0.3	1132	234	59	1185	21557
MALUKU UTARA	2017	0.33	1265	553	29	1209	23211
MALUKU UTARA	2018	0.33	1331	654	32	1218	25034
MALUKU UTARA	2019	0.31	1349	780	20	1235	26598
MALUKU UTARA	2020	0.29	1221	723	35	1282	28031
MALUKU UTARA	2021	0.27	1262	844	141	1299	32739
MALUKU UTARA	2022	0.3	1223	572	508	1319	40248
PAPUA BARAT	2013	0.41	1064	65	232	828	47694
PAPUA BARAT	2014	0.4	1122	61	175	849	50260

PAPUA BARAT	2015	0.42	1284	92	192	871	52346
PAPUA BARAT	2016	0.4	1322	489	179	893	54711
PAPUA BARAT	2017	0.38	1411	339	109	915	56908
PAPUA BARAT	2018	0.39	1431	445	141	941	60466
PAPUA BARAT	2019	0.38	1456	492	111	963	62075
PAPUA BARAT	2020	0.37	1299	483	154	1134	61604
PAPUA BARAT	2021	0.37	1307	686	132	1156	61289
PAPUA BARAT	2022	0.38	1307	477	3276	1183	62518
PAPUA	2013	0.44	1889	134	287	3032	117119
PAPUA	2014	0.45	1991	121	244	3091	121391
PAPUA	2015	0.39	2277	460	197	3149	130312
PAPUA	2016	0.39	2502	328	277	3207	142225
PAPUA	2017	0.39	2338	1029	258	3265	148818
PAPUA	2018	0.39	2571	919	254	3300	159712
PAPUA	2019	0.39	2616	1199	210	3347	134566
PAPUA	2020	0.39	2330	377	252	4303	137787
PAPUA	2021	0.39	2314	2584	758	4355	158674
PAPUA	2022	0.39	2314	752	2079	4418	172905

Lampiran II. Analisis Deskriptif

	LOGGR	LOGDAU	LOGDAK	LOGDBH	LOGJP	PDRB
Mean	-1,05114	7,162416	6,209104	5,369623	8,355490	11,82080
Median	-1,04982	7,146771	6,56733	5,135798	8,288908	11,72049
Maximum	-0,79850	11,13241	9,334768	11,23402	10,80781	14,42323
Minimum	-1,42711	2,995731	0,000000	2,564949	6,464588	9,809671
Std. Dev.	0,115890	0,623840	1,596448	1,382529	1,007443	1,094296
Skewness	-0,15545	-1,229030	-0,596448	0,511763	0,642763	0,451162
Kurtosis	2,92624	19,50868	3,067833	3,334190	3,144631	2,657018
Jarques-Bera	1,38683	3784,024	19,39157	15,74700	22,73163	12,65732
Probability	0,499864	0,000000	0,000062	0,000381	0,000012	0,001784
Sum	-342,673	2334,948	2024,168	1750,497	2723,890	3853,582
Sum Sq. Dev	4,36493	126,4822	823,5683	621,2005	329,8562	389,1825
Observation	326	326	326	326	326	326

Lampiran III. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests Equation:
Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	44.223432	(33,287)	0.0000
Cross-section Chi-square	588.695452	33	0.0000

Lampiran IV. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test Equation:
Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	56.787912	5	0.0000

Lampiran V. Model Terbaik Fixed Effect Model

Dependent Variable: LOGGR
Method: Panel Least Squares Date:
04/28/24 Time: 10:59 Sample: 2013
2022
Periods included: 10
Cross-sections included: 34
Total panel (unbalanced) observations: 326

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.419053	0.324517	4.372819	0.0000
LOGDAU	-0.016047	0.006849	-2.343033	0.0198
LOGDAK	-0.002819	0.002720	-1.036367	0.3009
LOGDBH	-0.006946	0.004139	-1.678023	0.0944
LOGJP	0.006016	0.012561	0.478935	0.6323
LOGPDRB	-0.198864	0.027901	-7.127390	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.861369	Mean dependent var	-1.051144
Adjusted R-squared	0.843014	S.D. dependent var	0.115890
S.E. of regression	0.045917	Akaike info criterion	-3.212095
Sum squared resid	0.605114	Schwarz criterion	-2.759062
Log likelihood	562.5715	Hannan-Quinn criter.	-3.031309
F-statistic	46.92766	Durbin-Watson stat	1.522180
Prob(F-statistic)	0.000000		